

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya



Oleh

IBTIGHO MARDHOTILLAH

NIM. 1502110472

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 1441 H / 2019 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN
NAMA : IBTIGHO MARDHOTILLAH
NIM : 1502110472
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
JENJANG : STRATA SATU (S1)

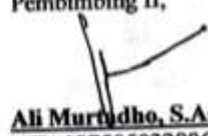
Palangka Raya, 10 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Sadhoni, M.H.
NIP. 196301011998031003

Pembimbing II,

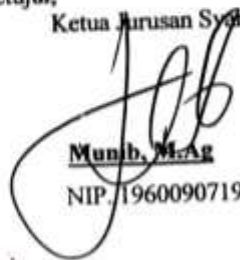

Ali Murtadho, S.Ag., M.H.
NIP. 197505032006041010

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,


Munib, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Ibtigho Mardhotillah

Palangka Raya, 10 Agustus 2019

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **IBTIGHO MARDHOTILLAH**

NIM : **1502110472**

Judul : **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**


NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP

PENCATATAN PERKAWINAN

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. Sudisni, M.H
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,


Ali Murtadho, S.Ag., M.H.
NIP. 197505032006041010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN"**, Oleh **IBTIGHO MARDHOTILLA**, NIM 1502110472 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 27 September 2019

Palangka Raya, 02 Oktober 2019

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **H. Syaikh, M.H.I**
Penguji I (.....)
3. **Dr. SADIANI, MH**
Penguji II (.....)
4. **Ali Murtadho, S.Ag., M.H.**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.,
NIP. 197704132003121003

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

ABSTRAK

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, hal ini jika dapat dibuktikan berdasarkan hasil tes DNA atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara langsung akan bersinggungan dengan pencatatan perkawinan, yakni berdampak pada diskursus pencatatan perkawinan di Indonesia. Bertitik tolak dari hal tersebut, penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Implikasi Putusan tersebut terhadap Pencatatan Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Analitis, Pendekatan Historis, Pendekatan Filsafat dan Pendekatan Kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia adalah menjadikan ketidakjelasan peraturan pencatatan perkawinan karena yang diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia baik itu dalam tataran yuridis, sosiologis maupun filosofis adalah putusan MK tersebut. Secara yuridis berlaku karena ada aturan lebih lanjut yang menjadi payung hukum. Secara sosiologis berlaku berdasarkan kepada penerimaan masyarakat melalui pengakuan maupun paksaan. Secara filosofis adalah melindungi hak konstitusional masyarakat seperti yang di atur dalam UUD 1945. Implikasi Putusan tersebut terhadap Pencatatan Perkawinan yaitu memiliki dampak positif dan negatif, berdampak positifnya adalah dapat memberikan rasa keadilan kepada anak agar mendapat perlindungan hukum. Bahwa putusan tersebut menjadikan status anak menjadi jelas berdasarkan pengakuan, sehingga melindungi anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat. Berdampak negatifnya yaitu terjadi kekacauan-kekacauan dalam ketatanegaraan bahkan secara sosial di masyarakat, pencatatan perkawinanpun menjadi terkesampingkan juga membuka pintu untuk melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan.

Kata kunci: Implikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pencatatan Perkawinan.

IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION No. 46 / PUU-VIII / 2010 TOWARDS REGISTRATION OF MARRIAGE

ABSTRACT

Children born outside of marriage is not only linked to civil with her mother, but also has a relationship to civil with his/her father, this matter if can be proved by the results test DNA or other evidence according to the law have blood relations, so that Decision of the Constitutional above Court will directly pertain to the registration of marriage, that is impact on ruling will ask for a marriage registration discourse in Indonesia. Seeing from this, this study is to assess the position of the Constitutional Court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 towards Marriage Registration in the Legal System in Indonesia and Implications of the Decision on Marriage Registration.

This study is a literature study, with data collection by using the method of documentation and interviews. The approach used is approach to law, Concept Approach, Analytical Approach, Historical Approach, Philosophy Approach and Case Approach.

The results of this study indicate the position of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 towards the registration of marriages in the legal system in Indonesia is to make fuzziness regulatory registration of marriages because as applied in the legal system in Indonesia be it at the level of judicial, sociological or philosophical is the decision of the Court. Juridically applicable because there are further rules that become the law shelter. Sociologically, it applies based on community acceptance through recognition and coercion. Philosophically is to protect the constitutional rights of society as regulated in the 1945. Implications of the Decision on Marriage Registration that has a positive and negative impact, the positive impact is to provide a sense of justice to children in order to get legal protection. That the decision to make the child's status become clear based on the recognition, thereby protecting children from marriages that do not recorded. The negative impact is occurred disturbances in the state administration even socially in the community, recording marriage records are ruled out also opens the door for mating with unregistered.

Keywords: *Implication, Constitutional Court Decision, and Marriage Registration.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. bahwa atas ridha dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman Aaamiin. Berkat curahan nikmat yang Allah SWT. berikan kepada kita, maka alhamdulillah terselesaikanlah skripsi ini yang berjudul: **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas ini, diantaranya adalah:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Mukhlis Effendi dan Ibunda Wiwi, peneliti memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang selalu mendoakan, senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang. Serta adik-adik tersayang Maghfiroh Nosa dan Ahmad Zahidi. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua aaamiin.
2. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
4. Yth. Bapak Dr. Sadiani, M.H. dan Ali Murtadho, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jariyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau dan semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan aaamiin.
5. Yth. Bapak Usman S.Ag. S.S. M.HI. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta staf-staf yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Para Kepala/pegawai beberapa Kantor Urusan Agama di Palangka Raya dan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Bapak Munib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada Bapak atas semua bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang diberikan. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat aaamiin.
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Dan terima kasih kepada staf fakultas syariah IAIN Palangka Raya yang telah rela bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua aaamiin
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2015 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti, semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kita semua aaamiin
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun akhirat aaamin ya robbal'aalamiin.

Akhirnya hanya kepada Allah segala yang baik dan berasal dari diri pribadi peneliti sendiri segala kesalahan. Semoga setipis apapun manfaat dari skripsi ini mampu menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. dan berguna untuk kita semua. aaamiin ya robbal'aalamiin.

Palangka Raya, 10 Agustus 2019

Peneliti,



IBTIGHO MARDHOTILLAH

NIM: 1502110472



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBTIGHO MARDHOTILLAH

NIM : 1502110472

Tempat, Tanggal Lahir : Kotawaringin Lama, 03 Juni 1997

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan”** ini adalah benar karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 Agustus 2019


IBTIGHO MARDHOTILLAH
NIM.1502110472

MOTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, nikmat, curahan kasih sayang dan segala hal yang tak mampu peneliti sebutkan satu persatu. *Sholawat* serta *Salam* semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in tabi'at yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman *Aaamin*. Karena beliau lah kita mampu merasakan nikmat Islam.

Kupersembahkan Karya sederhana ku kepada:

Pahlawan hidupku

Ayahanda Mukhlis Effendi dan Ibunda Wiwi

Kedua orang ku tercinta yang tak pernah mengeluh dengan segala yang ada dalam diriku, telah banyak air mata, keringat, pengorbanan yang telah kau berikan.

Malaikat-malaikat ku

Adik- adik tersayang Maghfiroh Nosa dan Ahmad Zahidi

Adik-adik ku tersayang yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat yang luar biasa untuk peneliti.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing akademik, **Bapak Munib, M.Ag** dan Dosen pembimbing skripsi, **Bapak Dr. Sadiani, M.H.** dan **Bapak Ali Murtadho, S.Ag., M.H.** yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.

Sahabat-sahabat HKI angkatan tahun 2015 semuanya yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga peneliti semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua mahasiswa HKI angkatan tahun 2015 kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

Dan seluruh Civitas Akademik IAIN Palangka Raya.

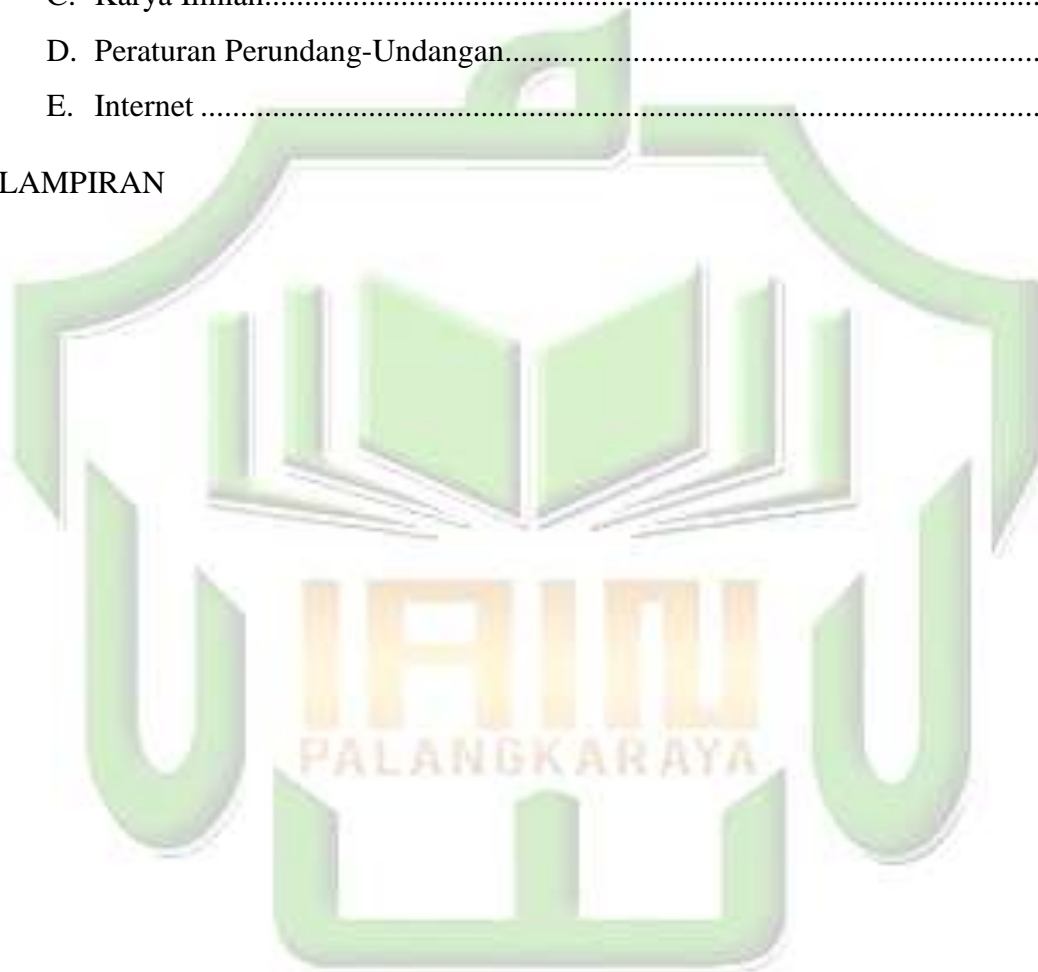
Terimakasih atas ilmu, nasehat, didikan, pengalaman, ajaran yang diberikan selama ini. Semoga Allah membalas semua jasanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Teori Keberlakuan Hukum.....	17
2. Teori Sinkronisasi Hukum	18
3. Teori Hukum Kritis	19
C. Konsep Penelitian.....	20
1. Pengertian Implikasi	20
2. Pengertian Mahkamah Konstitusi	20

3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi	23
4. Pengertian Pencatatan Perkawinan	25
5. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	38
D. Kerangka Pikir, Skema Penelitian dan Fokus Penelitian	39
1. Kerangka Pikir	39
2. Skema Penelitian	40
3. Fokus Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	42
B. Waktu dan Tempat Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Pengolahan Data	47
F. Metode Analisis Data	48
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	49
A. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia	49
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	49
2. Sumber Hukum di Indonesia.....	58
3. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Sumber Hukum di Indonesia.....	60
4. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam sistem hukum di Indonesia.....	65
5. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia	73
B. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan	93
1. Dampak Positif.....	93
2. Dampak Negatif	99
3. Dampak Positif dan Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan.....	106

BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
A. Al-Qur'an	121
B. Buku	121
C. Karya Ilmiah.....	125
D. Peraturan Perundang-Undangan.....	125
E. Internet	126
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	1	Perbandingan	Penelitian	Terdahulu
.....				
15				
Tabel	2	Matrik	Kegiatan	Penelitian
.....				
44				



DAFTAR SINGKATAN



CLS	: <i>Critical legal studies</i>
dkk	: dan kawan-kawan
DNA	: <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
h.	: Halaman
HAM	: Hak Asasi Manusia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Kec.	: Kecamatan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Komnas	: Komisi Nasional
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUH	: Kitab Undang-undang Hukum
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUNAS	: Musyawarah Nasional
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
No.	: Nomor
PA	: Pengadilan Agama
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah

PUU	: Pengujian Undang-Undang
Q.S.	: Quran Surah
RI	: Republik Indonesia
SAW	: <i>Ṣallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SIM	: Surat Izin Mengemudi
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SWT	: <i>Subḥanahu wa ta'ala</i>
t.tp	: Tanpa Tempat Penerit
t.d.	: Tidak diterbitkan
UI	: Universitas Indonesia
UN	: Universitas Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Perkawinan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	L	em
ن	Nun	N	en
و	wawu	W	em
ه	Ha	H	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta'aaqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Dalam konteks negara hukum, keberadaan lembaga hukum adalah sebuah keniscayaan. Dengan kerangka pikir tersebut kedudukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga yudikatif¹ yang diberikan wewenang langsung oleh konstitusi dalam penegakan hukum.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum, mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.² Dengan konsep demikian, maka terhadap putusan MK tidak terdapat upaya hukum lanjutan, termasuk dalam hal uji materi (*judicial review*) UU terhadap UUD. Padahal tidak jarang putusan MK tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Diantara putusan MK yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat adalah terkait *judicial review* UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya

¹Menurut pasal 24 UUD 1945, wewenang yudikatif diberikan pada lembaga MA dan MK.

²Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 214.

yang berkaitan dengan norma pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.³ Eksistensi pencatatan akad nikah memiliki manfaat dan kebaikan bagi pasangan suami istri. Kepentingan-kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga dapat dilindungi dan keduanya juga dapat membuktikan bahwa mereka pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara, bahkan identitas anak yang dihasilkan dari pernikahan ini pun dapat diketahui secara pasti.⁴

Akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri juga adanya akibat hukum terhadap anak keturunan yang dilahirkan. Berbeda halnya dengan latar belakang salah seorang artis di Indonesia yang bernama Aisyah Mochtar alias Machica yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi tentang status anaknya hasil dari Nikah Sirri bersama suaminya yang bernama Moerdiono agar mendapat legitimasi bahwa anaknya dianggap sah dengan kronologi sebagai berikut:

Tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon 1 Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, h.53.

⁴Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, Yogyakarta: K-Media, 2017, h. 64.

H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang 2.000 (dua ribu) Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas dibayar tunai. Moerdiono seorang suami yang sudah beristri menikah lagi dengan istri kedua (Pemohon 1) dengan akad nikah secara Islam tetapi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama di daerah kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Hasil dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (Pemohon 2).⁵

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersebut menetapkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Oleh sebab itu, Hj. Aisyah Mochtar maupun Iqbal merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut karena perkawinan Hj. Aisyah Mochtar tidak diakui menurut hukum dan anaknya (Iqbal) tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdono) dan keluarga ayahnya.⁶

⁵Mercilita M. Mema, *Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak diluar Perkawinan Menuurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Lex Privatom, Vol.II/No. 2/April/2014, h.45.

⁶Risalan Basri Harapap, *Analisis Terhadap Putusan MK tentang Anak di Luar Kawin*, Jurnal Yurisprudencia Volume 1 Nomor 1 Juni 2015, h.122.

Para pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, intinya menurut para Pemohon Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, singkatnya menurut Pemohon, ketentuan tersebut telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁷

Berdasarkan permohonan tersebut, maka lahirilah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam salah satu putusannya, memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, yang tertulis sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 14-15

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*⁸

Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu putusan final.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2012 sesuai pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka ketentuan pasal 43 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁹ Padahal, untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.¹⁰

Putusan ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Di satu sisi putusan ini melegakan sebagian pihak seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM menyambut positif putusan MK karena sejalan dengan konstitusi dan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan juga

⁸*Ibid.*, h. 37.

⁹Gushairi, *Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia*, Jurnal Madania: Volume 4: 1, 2014, h. 5.

¹⁰PadamuNegeri, <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>, online 20 Januari 2019.

putusan tersebut di anggap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.¹¹ Di sisi yang lain dampak putusan ini menimbulkan permasalahan yang baru seperti adanya reaksi dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa nomor: 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa ini merupakan reaksi penolakan dari Majelis Ulama Indonesia terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan melakukan kajian sesuai Syariat Islam dan fokus pertimbangan yang menjadi pembahasan dalam isi fatwa tersebut menyinggung tentang anak di luar perkawinan atau anak hasil zina. Karena dalam pendapat Mahkamah yang tertulis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.¹²

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka memberikan makna pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi kabur dan kedudukan pencatatan dalam perkawinan dilemahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN”**.

¹¹Isna Fitria, <https://www.kompasiana.com/pro-kontra-anak-luar-kawin-paska-putusan-mk> (online 4 April 2019).

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 35.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, peneliti membatasi pada pembahasan tentang kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan. Sedangkan diluar pembahasan tersebut peneliti tidak mencantumkan dalam penulisan ini.

D. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mendeskripsikan tentang:

1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan.

E. Kegunaan Penelitian

Suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik berguna untuk peneliti pada khususnya dan berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan, yakni: kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
 - b. Untuk memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan pencatatan perkawinan.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah IAN Palangka Raya.

- b. Untuk menjadikan pusat perhatian terhadap hukum di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpendapat dalam entitas kehidupan di Indonesia.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan peneliti, terkait dengan pencatatan perkawinan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori dan Konsep Penelitian, bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori antara lain Teori Keberlakuan Hukum, Teori Sinkronisasi Hukum dan Teori Hukum Kritis, konsep penelitian antara lain Pengertian Implikasi, Pengertian Mahkamah Konstitusi, Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengertian Pencatatan

Perkawinan dan Pengertian Nikah *Sirri*, kerangka pikir, skema penelitian dan fokus penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan tipe dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Bab IV: Hasil Pemaparan dan Analisis, bab ini akan diuraikan tentang kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia dan Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan.

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencoba menelaah dan mencari skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Hal ini bertujuan sebagai titik-tolak bagi peneliti untuk menentukan keabsahan fokus permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan yang peneliti ketahui, terdapat beberapa karya ilmiah yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai objek utama kajiannya. Karya ilmiah yang peneliti ketahui tersebut berupa tesis dan skripsi, tetapi pada fokus permasalahan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi dan tesis yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Santi tahun 2014, dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya).” Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, dan akibat hukum putusan tersebut terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu adanya pembatasan istilah di luar perkawinan, pengecualian hak nasab dan tetap memiliki hubungan perdata pada ibunya. Sedangkan perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap anak biologis dalam tinjauan hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif.¹³

2. Dika Juan Aldira Tahun 2017, dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewarisan Anak Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010).” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewarisan anak luar perkawinan pasca putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu putusan yang sangat revolusioner dan berdampak terhadap hubungan keperdataan anak di luar perkawinan dengan bapak biologisnya khususnya dalam hal kewarisan. Pasca putusan MK anak di luar perkawinan yang semula hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kini tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang memang sudah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang menurut hukum mampu membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya, serta memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti ahli waris dari perkawinan yang sah.¹⁴

¹³Santi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hak Anak Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah STAIN Palangka Raya, 2014, h. viii, t.d.

¹⁴Dika Juan Aldira Tahun, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewarisan Anak Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Skripsi Sarjana, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017, h. ii, t.d.

3. Nastaina Dewi Risanty Malik, S.H. Tahun 2012, dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia.” Fokus penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana kedudukan hukum anak zina menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak zina di Indonesia. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Kedudukan hukum anak zina di Indonesia berdasarkan KUHPdata, anak zina tidak memiliki kedudukan hukum apapun, mengingat anak zina termasuk dalam katagori anak luar kawin yang tidak dapat diakomodir dalam lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, sehingga tidak dapat mewaris. Mengingat bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan anak hanya dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin dan sehubungan dengan fakta bahwa anak zina tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah, maka dapat disimpulkan bahwa anak zina termasuk di dalam katagori anak luar kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil atas Pasal 43 ayat (1), maka sejak tanggal dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, maka anak zina memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.¹⁵

4. Amin Udin Tahun 2018, dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kewarisan Anak Luar Kawin”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Islam, KUHPdata dan Hukum adat dan Bagaimana akibat Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-

¹⁵Nastaina Dewi Risanty Malik, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia*, Tesis Magister, Depok: Fakultas Hukum UI, 2012, h. vii, t.d.

VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin dalam hal pewarisan terhadap ayah biologisnya. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin, tidak menghapus atau merubah ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya saja mengubah makna asalkan memenuhi syarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan putusan tersebut, hubungan perdata anak luar kawin tidak hanya timbul dari pengakuan saja tetapi dapat timbul karena hubungan darah antara anak luar kawin dengan orang tuanya, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai penguat kedudukan anak luar kawin untuk memperoleh hak waris terhadap ayah biologisnya karena hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.¹⁶

5. Benny Dwi Mahendra Tahun 2013, dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri.” Fokus penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan bagaimanakah status hukum anak luar kawin dari hasil perkawinan sirri kepada orang tua biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimanakah prosedur pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis dari perkawinan sirri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁶Amin Udin, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kewarisan Anak Luar Kawin*, Skripsi Sarjana, Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2018, h. viii, t.d.

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah, karena pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sesuai agama Islam sebagaimana sesuai bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari bunyi Pasal diatas jelas bahwa perkawinan itu sah jika telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya akan tetapi perkawinan sirri tersebut belum terpenuhinya syarat administratif sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 perundang-undangan yang berlaku”. Maka status hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan statusnya adalah anak luar kawin. Anak luar kawin tersebut statusnya bisa berubah menjadi anak sah menurut pandangan hukum positif jika telah dilakukan Istbat Nikah di Pengadilan Agama dan atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama tersebut, barulah perkawinan sirri tersebut bisa dilakukan pencatatan di KUA. Untuk membuktikan apakah anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya harus bisa di buktikan dengan menggunakan tes DNA. Anak tersebut akan otomatis sah pada umumnya, yaitu: hak waris, hak penafkahan, hak perwalian.¹⁷

Perbedaan penelitian peneliti dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Santi, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Biologis	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	Hak Anak Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya) sedangkan

¹⁷Benny Dwi Mahendra, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri*, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Hukum UN Semarang, 2013, h. ix, t.d.

	Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya), 2014, kajian lapangan.		peneliti terhadap pencatatan perkawinan.
2.	Dika Juan Aldira, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewarisan Anak Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010), 2017, kajian pustaka.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	Kewarisan Anak Luar Perkawinan sedangkan peneliti terhadap pencatatan perkawinan.
3.	Nastaina Dewi Risanty Malik, S.H., Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia, 2012, kajian pustaka.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia sedangkan peneliti terhadap pencatatan perkawinan.
4.	Amin Udin, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	Kewarisan Anak Luar Kawin sedangkan peneliti terhadap pencatatan perkawinan.

	VIII/2010 Terhadap Kewarisan Anak Luar Kawin, 2018, kajian pustaka.		
5.	Benny Dwi Mahendra, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri, 2013, kajian pustaka.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri sedangkan peneliti terhadap pencatatan perkawinan.

B. Kajian Teori

1. Teori Keberlakuan Hukum

Berlakunya kaidah hukum adalah tentang landasan keberlakuan kaidah hukum untuk menentukan sahnya suatu kaidah hukum terdapat tiga landasan (yuridis, sosiologis, filosofis). Keberlakuan hukum secara yuridis, terdapat empat paradigma yaitu W. Sevenbergen, Hans Kelsen, Radbruch dan Logemann.¹⁸ Landasan yuridis yang menjadikan suatu kaidah hukum itu sah, karena:

- Proses penentuannya memadai, baik karena sesuai prosedur yang berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (W. Sevenbergen),
- Sesuai dengan pertingkatan hukum atau kaidah hukum yang lebih tinggi (Hans Kelsen),

¹⁸Muhamad Erwin dan Firman Freaddy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h. 32.

- c. Didasarkan kepada sistem/ tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch),
- d. Didasarkan kepada adanya ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/ berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (Logemann).

Keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, berdasarkan kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan teori paksaan. Sedangkan kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi kepada kedamaian dan keadilan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa (Pancasila). Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Adapun apabila hanya berlaku secara sosiologis (dalam teori paksaan), maka kaidah tersebut hanya menjadi aturan pemaksa. Dan jika hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya

¹⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 44-45.

merupakan hukum yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, agar suatu hukum berlaku dengan baik harus terpenuhi keberlakuan hukum, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Teori Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyerentakan, penyesuaian.²⁰ Kesesuaian dari aturan hukum disebut dengan sinkronisasi. Sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang berarti sejalan, sesuai, selaras.²¹ Makna dari sinkronisasi secara vertikal adalah sesuai dengan garis yang lurus atas bawah. Antar hukum yang tidak sederajat. Telaah terhadap sinkronisasi vertikal horizontal suatu aturan hukum berkaitan dengan asas perundang-undangan. Ada empat asas berlakunya perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut artinya suatu Undang-Undang daya berlakunya tidak dapat mundur sebelum tanggal ditetapkannya;
- b. *Lex posterior derogat legi priori* artinya suatu Undang-Undang kemudian menyisihkan yang terdahulu;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori* artinya suatu Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.
- d. *Lex specialis derogat legi generali* artinya suatu Undang-Undang yang khusus mengesampingkan yang lebih umum.²²

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1314.

²¹Asri Wijayanti, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012, h. 8.

²²Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h.156.

3. Teori Studi Hukum Kritis

Studi hukum kritis atau *critical legal studies* (Roberto M. Unger), menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya. Berbeda dengan kaum legis liberal, gerakan *Critical legal studies* ini menginginkan kritik mereka memberikan sumbangan bagi transformasi politik dalam masyarakat atau mempunyai implikasi praksis. Kalangan CLS ingin mengedepankan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu semata-mata pada segi-segi doctrinal (*internal relation*), tapi juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor di luar itu seperti bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, dan konteks politik dalam proses pembentukan dan aplikasi hukum (*external relation*). CLS menuntut pemahaman terhadap kepastakaan fenomenologi, post-strukturalisme, dekonstruksi dan linguistic untuk membantu memahami relasi eksternal tersebut.²³

C. Konsep Penelitian

1. Pengertian Implikasi

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.²⁴ Sehingga Implikasi adalah hubungan keterlibatan yang menimbulkan akibat langsung yang terjadi karena penemuan atau karena hasil penelitian. Dalam hal ini,

²³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, h. 81.

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 427.

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 akan menimbulkan implikasi/ akibat langsung terhadap peraturan pencatatan perkawinan karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seolah mengabaikan peraturan pencatatan perkawinan sebagai penentuan keabsahan perkawinan di Indonesia.

2. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu mahkamah dan konstitusi. Mahkamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan dan dapat juga diartikan badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran.²⁵ Sedangkan konstitusi dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), serta dapat juga berarti undang-undang dasar suatu negara.²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar.

a. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yaitu:
mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik

²⁵Pranala, <https://kbbi.web.id/mahkamah>, (online 15 Januari 2019).

²⁶Pranala, <https://www.google.com/amp/s/kbbi/web.id/konstitusi.html>, (online 15 Januari 2019).

penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.²⁷

Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Maruarar Siahaan, yaitu:

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.²⁸

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya.²⁹

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

²⁷Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 7.

²⁸*Ibid.*, h. 8.

²⁹*Ibid.*

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:³⁰

- a) Kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;³¹
- b) Kewenangan memutus sengketa lembaga negara;³²
- c) Kewenangan memutus pembubaran partai politik;³³
- d) Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;³⁴
- e) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁵

3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

³⁰*Ibid.*, h. 11.

³¹Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam system ketatanegaraan republic Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 31.

³²*Ibid.*, h. 33.

³³*Ibid.*, h. 37.

³⁴*Ibid.*, h. 38.

³⁵*Ibid.*, h. 39.

umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.³⁷

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.³⁸

Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara

³⁶Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h.201.

³⁷*Ibid.*, h. 214.

³⁸*Ibid.*, h. 215.

³⁹*Ibid.*, h. 216.

sebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁴⁰

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁴¹

Ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

4. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan sipil berarti pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

⁴⁰*Ibid.*, h. 214.

⁴¹*Ibid.*, h. 219.

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁴²

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan pada angka 4.b. penjelasan umum, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁴³

Berdasarkan pengertian pencatatan perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah usaha pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan mewujudkan ketertiban perkawinan dengan maksud apabila suatu saat diperlukan dapat dipakai sebagai alat bukti yang autientik.

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata (نكاح) yang menurut Bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁴⁴

⁴²Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 ayat (15) dan (17).

⁴³*Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya*, t.tp., Trinty, 2007, h. 110.

⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 7.

Pengertian perkawinan dari berbagai pendapat di antaranya sebagai berikut:

- a. Nikah menurut jumhur ulama (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hambali) makna hakiki berarti akad, sedangkan makna majazi berarti hubungan intim.⁴⁵
- b. Nikah menurut Ibrahim Hosen yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, "Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh."⁴⁶
- c. Nikah menurut Sulaiman Rasyid yang dikutip oleh Abd. Shomad, merumuskan "Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom."⁴⁷

Menurut peneliti definisi perkawinan yang telah diuraikan tampak berbeda-beda, tetapi tak menyebabkan adanya pertentangan. Perkawinan selain untuk beribadah kepada Allah SWT. dan menjalankan Sunnah Rasulallah SAW. Juga untuk berhubungan antara pria dan wanita untuk membangun, membina dan memelihara

⁴⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, h. 45.

⁴⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, h.3.

⁴⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 260.

hubungan kerabat dengan rukun dan damai. Sebagaimana firman

Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁸

1) Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁴⁹ Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yakni adanya calon suami dan istri, adanya wali, adanya dua orang saksi dan sighat akad nikah.⁵⁰

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁵¹ Syarat sahnya perkawinan adalah rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain:

a) Calon suami dan istri

⁴⁸ Ar-Rum [30]: 21. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009, h. 406.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 45.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 47.

⁵¹ *Ibid.*, h. 46.

Syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami dan istri adalah sama-sama beragama Islam, antara laki-laki dan perempuan harus jelas orangnya, atas kerelaannya dan di antara calon suami dan istri tidak terdapat halangan pernikahan.

b) Adanya wali

Perkawinan dilangsungkan oleh pihak calon istri atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali adalah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah.

c) Adanya dua orang saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

d) Sighat akad nikah

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.⁵²

2) Legalitas Perkawinan

a) Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan

⁵²*Ibd.*, h. 57.

menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam⁵³ yaitu memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan sesuai syara'. Dengan demikian, jika suatu perkawinan menyimpang atau tidak lengkap rukun dan syaratnya, perkawinan dapat dikategorikan batal. Jika terjadi hubungan seksual atau bersetubuh pada kedua pasangan, hal demikian dihukumi melakukan perzinahan.⁵⁴ Berdasarkan uraian mengenai legalitas perkawinan menurut hukum Islam, maka sahnya perkawinan adalah dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang telah peneliti jabarkan sebelumnya. Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam adalah menekankan pada aspek keagamaan, karena berkaitan dengan halalnya hubungan suami-istri.

b) Legalitas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-

⁵³M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 14.

⁵⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 116.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.⁵⁵ Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif⁵⁶

Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Anshary MK menjelaskan bahwa:

Dari segi teori hukum, suatu perbuatan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan itu dilakukan menurut hukum, oleh karena itu menimbulkan akibat hukum yakni tindakan tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya, suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka ia tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun perbuatan tersebut belum tentu melawan hukum. Konsekuensinya bahwa perbuatan itu sama sekali tidak mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁵⁷

Berdasarkan uraian mengenai legalitas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka sahnyanya perkawinan adalah menekankan pada aspek legalitas dalam artian memiliki kekuatan hukum dan mendapat pengakuan dari negara yaitu dengan mencatatkan perkawinannya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 48.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 50.

⁵⁷ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan...*, h. 23.

melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁵⁸

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni: manfaat preventif dan manfaat represif. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.⁵⁹ Adapun manfaat represif adalah bagi suami isteri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk

⁵⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 107.

⁵⁹*Ibid.*, h. 111.

mengajukan permohonan *istbat* nikah (penetapan) kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang.⁶⁰

a. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur hal ihwal perkawinan itu ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Qur'an. Keseluruhan ayat Al-Qur'an tentang munakahat tersebut disepakati keberadaannya sebagai firman Allah.⁶¹ Begitu juga di dalam hadis ada dua kitab hadis yang populer yang secara khusus membahas tentang hukum, yaitu kitab *Muntatakha al-Akhbar* karya Ibnu Taimiyah yang disyarahkan oleh al-Syawkany dalam kitabnya *Nail al-Awthar* dan kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani yang disyarahkan oleh al-Kahlani al-Shan'aniy dalam kitabnya *Subul al-Salam*. Dari yang pertama ditemukan sekitar 300 hadis tentang perkawinan dan dari kitab yang kedua ditemukan sekitar 175 hadis Nabi.⁶²

⁶⁰*Ibid.*, 117.

⁶¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 6.

⁶²*Ibid.*, h. 13.

Sekian banyak ayat al-Qur'an dan Hadis tidak ada satupun ditemukan secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan, hanya saja terdapat ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَدَّعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya, maka jika ada orang yang lemah akal atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu untuk mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorangnya lupa maka yang seorangnya mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Hal yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶³

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* bahwa:

Q.S. Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama *Ayat al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan tetapi pencatatan perkawinan tersebut dijadikan bukti autentik dalam suatu perkawinan.

b. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Nasional

Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan perkawinan diatur dalam *Huwelijksordonantie Staatsblad* 1929 Nomor 348. *Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad* 1933 Nomor 48 dan *Huwelijk sordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 Nomor 482. Setelah Indonesia merdeka semua peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

⁶³ Al-Baqarah [2]:282. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 48.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1 Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 730.

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang waktu itu diberlakukan di daerah Jawa, Madura, sedangkan untuk Sumatera oleh pemerintah darurat RI diberlakukan Ketetapan Nomor 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949. Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Talak dan Rujuk yang waktu itu hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura, mulai tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Kemudian untuk pengganti *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 Nomor 482 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁶⁵

Aturan pencatatan perkawinan diperkuat dalam Undang-Undang Perkawinan, yang berlaku secara nasional tanpa membedakan agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme prosedur pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁶⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3, 6 ayat (1) dan (2) yaitu Pasal 3 tentang

⁶⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*...h. 53-54.

⁶⁶ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011, h. 72.

orang yang akan melangsungkan pernikahan supaya memberitahukannya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada Pasal 6 Pegawai Pencatat yang menerimanya, hendaklah meneliti apakah syarat-syarat telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.⁶⁷

Pencatatan perkawinan diatur lebih rinci lagi dalam KHI pada Pasal 5-7 yaitu tentang Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Jika perkawinan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶⁸

Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan peraturan untuk tuntunan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan administrasi pernikahan kepada masyarakat yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Untuk melakukan pemberitahuan kehendak nikah dinyatakan dalam Pasal 5 yaitu tentang pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri dan

⁶⁷*Ibid.*, h. 107.

⁶⁸*Kompilasi Hukum Islam...*, h. 8.

pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir Pemberitahuan.⁶⁹ Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pencatatan perkawinan adalah sebuah sistem administrasi, di mana ada petugas pencatatan secara khusus, objek yang dicatat adalah perbuatan hukum yaitu perkawinan. Hal hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, talak, ruju diharuskan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi yang beragama Islam untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan bagi yang beragama non-Muslim di Kantor Catatan Sipil.⁷⁰

5. Pengertian Nikah *Sirri*

Nikah *Sirri* artinya nikah rahasia, lazim juga disebut sebagai nikah dibawah tangan.⁷¹ Nikah *Sirri* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bahwa perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Status anak yang lahir dari nikah *sirri* adalah anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat lain yang dapat dihadapi oleh pihak-pihak dalam perkawinan adalah jika terjadi perpisahan, maka pembagian harta gono-gini tidak dapat diselesaikan secara hukum melalui lembaga pemerintah, karena

⁶⁹Undang-Undang No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

⁷⁰Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2011, h.63.

⁷¹Sahiron Syamsuddin, *Al-qur'an dan Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011, h. 287.

tidak adanya bukti autentik telah terjadinya sebuah perkawinan.⁷²

Jadi, perkawinan dilaksanakan tidak menurut ketentuan hukum negara, tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing suami/istri, kejelasan terhadap anak, kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam pelayanan publik dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

D. Kerangka Pikir, Denah Penelitian dan Fokus Penelitian

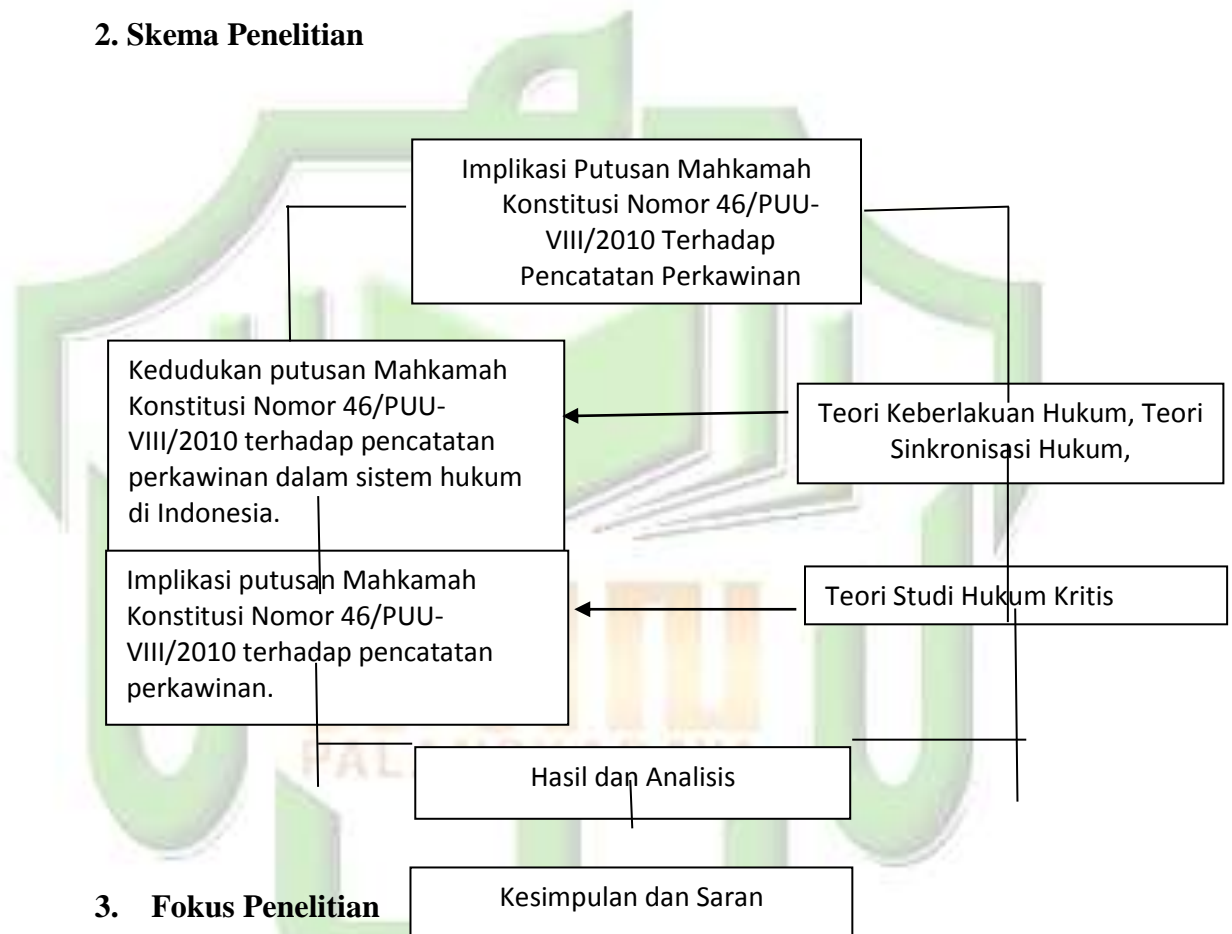
1. Kerangka Pikir

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam salah satu putusannya memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Sejak hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan makna pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi kabur dan kedudukan pencatatan dalam perkawinan dilemahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dan memiliki banyak manfaat juga sebagai bukti autentik, maka tidak seharusnya putusan MK tersebut mengenyampingkan hal yang perlu diprioritaskan. Tetapi

⁷²*Ibid.*, h. 292.

putusan tersebut adalah sebagai yurisprudensi yang mana akan menjadi acuan untuk hakim-hakim setelahnya untuk memberikan putusan dalam kasus yang sama. Putusan tersebut selain memberikan perlindungan kepada anak juga memiliki dampak negatif yaitu hancurnya ketatanan hukum di Indonesia.

2. Skema Penelitian



3. Fokus Penelitian

Berdasarkan denah kerangka tersebut maka fokus yang digali dan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pencatatan Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. Yang dikehendaki dari fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - 2) Sinkronisasi hukum antar putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- b. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi.
- 1) Dampak positif Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) Dampak negatif Putusan Mahkamah Konstitusi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian eksplanatoris yaitu suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji suatu ketentuan hukum.⁷³ Penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.⁷⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.⁷⁵ Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan termasuk penelitian hukum normatif yaitu meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan yang digunakan dan relevan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Analitis, Pendekatan Historis, Pendekatan Filsafat dan Pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.⁷⁶ Pendekatan konsep digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum yang ada dan keterkaitannya dengan

⁷³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 9.

⁷⁴Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, h. 132.

putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun cara kerja pendekatan analitis, historis dan filsafat adalah dengan merunut akar historis secara kritis bagaimana latar belakang putusan tersebut ada dan berusaha mencari kedudukan putusan tersebut terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia dengan memakai teori keberlakuan hukum dan itulah yang menjadi ciri pendekatan filsafat, yang terakhir adalah cara kerja pendekatan kasus yaitu dengan berusaha memahami dan menganalisis pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2

Matrik Kegiatan Penelitian

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			
		SEP 2018 – MARET 2019	MARET- JULI 2019	AGUSTUS 2019	SEPTEMBER 2019
1.	Perencanaan, Pengajuan Judul s/d Seminar Proposal				
2.	Pengumpulan dan Analisis Data				
3.	Bimbingan Skripsi				
4.	Ujian Skripsi				

Berdasarkan matriks kegiatan penelitian di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan yang terdiri dari pengajuan judul sampai dengan seminar proposal, pengumpulan sekaligus analisis data, bimbingan skripsi dan ujian skripsi pada bulan September.

2. Tempat Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan IAIN Palangka

Raya. Pengumpulan data dan informasi juga dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap mempunyai informasi berkaitan dengan permasalahan yaitu KUA dan PA di Kota Palangka Raya.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen dokumen resmi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Data ini juga ditambah dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat menjelaskan sumber hukum primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai bahan kepustakaan seperti buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, artikel dan internet.

Selain menggunakan bahan hukum tersebut peneliti juga melakukan wawancara (*interview*) untuk memperkuat analisis dengan

beberapa pihak yang berkaitan dalam penelitian seperti ketua KUA, penghulu KUA dan hakim PA yang berada di Kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Di dalam suatu penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁷⁷ Adapun pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*. Riset kepustakaan memiliki arti lebih dari sekedar langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh informasi penelitian sejenis dan memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h.67.

memerlukan riset lapangan.⁷⁸ Hal ini dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan berupa literatur- literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikann jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁹ Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan langsung dari salah satu ketua dan penghulu di KUA juga hakim PA mengenai pendapatnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2010 yang memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

E. Pengolahan Data

Penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan

⁷⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 2.

⁷⁹*Ibid.*, h. 135.

hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa.⁸⁰ Adapun analisis bahan yang dilakukan setelah adanya pengumpulan, klarifikasi dan menelaah bahan yang ada, maka bahan hukum dalam penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan teori yang ada.

F. Metode Analisis Data

Analisis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁸¹ Data yang diperoleh baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif. Penelitian juga menggunakan metode *content analysis* yang digunakan untuk memahami dan menganalisis isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁸²

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h.251.

⁸¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian...*, h.166.

⁸²Cik Hanan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 288.

BAB 1V

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

a. *Posita*

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan, pemerintah memberikan ketentuan untuk mencatatkan tiap-tiap perkawinan.⁸³ Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan mengakibatkan tidak diakuinya perkawinan tersebut dimata hukum perdata dan anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁸⁴

Akibat hukum dari adanya sebuah ikatan perkawinan salah satunya adalah timbulnya tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Hukum perdata membagi anak dalam dua katagori, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sedangkan anak luar kawin dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah

⁸³*Kompilasi Hukum Islam Indonesia...*, h. 90.

⁸⁴*Ibid.*, h. 101.

dan ibunya melalui pengakuan anak.⁸⁵ Maka jika melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan berakibat tidak jelasnya status sebuah perkawinan dan keberadaan eksistensi anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah anak luar kawin menurut hukum perdata. Untuk itu para pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 di MK dengan dasar konstitusional yang menurut pemohon bertentangan dengan UUD dan merugikan hak warga Negara Indonesia khususnya perempuan dan anak dari perempuan itu sendiri yaitu: Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Mahkamah memiliki kewenangan dalam memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal UU agar berkesesuaian dan merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. oleh karena itu, setelah MK mendapat laporan surat permohonan uji materiil, maka MK melakukan pemeriksaan secara mendalam sesuai

⁸⁵R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005, h. 69.

dengan kewenangannya. Selanjutnya MK akan melakukan penelitian dan pemeriksaan, sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan. Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011.⁸⁶ Pemerintah juga menyampaikan keterangan secara lisan dan keterangan tertulis.

Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan PUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan yaitu menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima, menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan, menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat

⁸⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 13.

(2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat juga memberikan keterangan. DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan yang pada intinya sama seperti yang diinginkan oleh Pemerintah yaitu meminta untuk menolak atau setidak-tidaknya permohonan tidak dapat diterima. Dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.⁸⁷

b. *Petitum*

Pemohon meminta untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.⁸⁸

c. *Pertimbangan Hukum*

Pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu tentang pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU

⁸⁷*Ibid*, h.25.

⁸⁸*Ibid*, h. 11.

1/1974, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.

Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Menurut Mahkamah pencatatan dianggap sebagai pembatasan, pencatatan tidak bertentangan dengan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis dan dengan dimilikinya bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik.⁸⁹

Menurut peneliti hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَدَّيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁹⁰

⁸⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 35.

⁹⁰Al-Baqarah [2]:282. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 48.

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan, tetapi ayat ini menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi. Proses kajian bisa dilakukan melalui *istihsan* atau lebih spesifiknya menggunakan *al-istihsan bi al-qiyas al-khafi* bahwa akad nikah yang dilakukan dipandang wajib untuk dicatat karena di dalam pencatatan mengandung kebaikan yang sangat banyak dan sekaligus menghindari kemudhoratan yang terjadi untuk istri. *Al-qiyas al-khafi* memiliki pengaruh hukum yang kuat, istri dihalalkan karena adanya ikatan batin yang suci di antara suami istri yang sepakat dan rela hidup bersama membina rumah tangga. Berbeda dengan *qiyas jalii* jika dilihat dari kesamaan *illah* yakni akad dan transaksi, maka akan menimbulkan anggapan bahwa perempuan yang dinikahi seorang laki-laki sama seperti barang utang piutang dan dapat diperjualbelikan atau diambil manfaatnya. Maka akan lebih tepat disini memakai *al-istihsan bi al-qiyas al-khafi* yakni akad yang kuat dan didalam pencatatan akad tersebut memiliki banyak kebaikan dan menghindari segala kemudhoratan.⁹¹

Berdasarkan ayat dan hal tersebut diatas maka adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan dalam UUP dan yang berkewenangan mencatatkan juga memberikan akta nikah yaitu dari pihak KUA adalah telah sesuai demi kemaslahatan manusia.

⁹¹ Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui....*, h. 96.

Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”.⁹²

Beberapa hal pokok yang harus dicermati terkait pertimbangan hukum MK dalam menafsirkan frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan” yaitu: pertama, ketidakmungkinan seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak tepat manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Kedua, menurut Mahkamah tidak tepat pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.⁹³

⁹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 34.

⁹³*Ibid.*, h. 35.

Mencermati pertimbangan hukum di atas, dapat dipahami bahwa hakim konstitusi salah satunya menggunakan metode interpretasi yang bersifat gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa. Penafsiran oleh hakim bertujuan supaya mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial.⁹⁴ Oleh karena itu menafsirkan kata “*yang dilahirkan di luar perkawinan*” apakah hanya sebatas perkawinan yang tidak dicatatkan atau seluruh anak yang dihasilkan oleh pasangan laki-laki atau perempuan dengan ikatan perkawinan atau tanpa ikatan perkawinan. Maka hakim di sini berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Jadi, anak yang tidak berdosa tersebut memiliki perlindungan hukum⁹⁵

Penafsiran secara sosiologis adalah puncak dari penafsiran secara tata bahasa, maka penjelasan oleh hakim yang harus menuju kepada pelaksanaan peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat. Putusan ini telah sejalan dan melegakan sebagian pihak seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM karena sejalan dengan konstitusi dan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan juga putusan tersebut di anggap

⁹⁴Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 88.

⁹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 36.

sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini terlepas dari kontradiktif terhadap putusan tersebut dari sebagian masyarakat lainnya.

Mahkamah Konstitusi juga memakai penafsiran Analogis artinya menafsirkan undang-undang dengan cara memberikan qiyas atau/ibarat seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD yang beliau sampaikan di TVOne dalam acara Indonesia Lawyers Club yang berjudul Nikah Siri Sah atau tidak, tanggal 26 September 2017 yaitu:

Hubungan hak dan kewajiban bisa timbul karena perjanjian bisa timbul karena peristiwa, misalnya orang nabrak orang itu tidak usah berjanji siapa yang nabrak, tapi siapa yang nabrak harus bertanggung jawab sama halnya dengan hubungan keperdataan karena seorang ayah/ seorang laki-laki maaf menzinai seorang perempuan lalu punya anak itu kan tidak pakai perjanjian. jadi, si anak maupun istri bisa menuntut hak keperdataannya. Bukan karena perjanjian tapi karena kejadian.

Menurut peneliti dalam hal ini Hakim Konstitusi menganalogiskan misalnya terjadi perzinaan dengan kecelakaan, jadi mereka memiliki hubungan keperdataan yang harus dipertanggung jawabkan oleh siapa yang memperbuat, dalam hal ini adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan.

d. Amar Putusan

Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sebagai berikut:

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁹⁶*

2. Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu segi materiil dan segi formil. Sumber hukum materiil adalah dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi. Sumber hukum formil adalah tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum, yang terdiri dari: Undang-undang, Yurisprudensi, Traktat, kebiasaan dan Pendapat Ahli Hukum. Tata

⁹⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 37.

urutan peraturan perundang-undangan RI adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah.

Yurisprudensi artinya putusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Traktat adalah perjanjian yang diadakan antara dua atau lebih negara. Traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara masing-masing negara yang mengadakannya. Oleh karena itu dapat dikatakan traktat merupakan sumber hukum. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Pendapat ahli hukum/sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.⁹⁷

Pengertian sumber hukum demikian, jelas berbeda dengan pengertian sumber hukum Islam yaitu yang dipakai acuan dalam istinbath hukum Islam adalah Kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah, Ijma', Qaul Shahabi, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, Syari'at Ummat Sebelum Islam dan Istishab. Oleh sebab itu, pengertian sumber Hukum Islam sebagai sumber rujukan baik yang bersifat naqli seperti (Al-Qur'an), As-Sunnah, Ijma', Qaul Shahabi, Urf dan Syari'at Ummat

⁹⁷Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, h. 21.

Sebelum Islam ataupun yang bersifat aqli seperti Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah dan Istishab.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Sumber Hukum di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 adalah termasuk yurisprudensi yaitu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal. Dalam penetapan mengenai soal yang harus diselesaikannya, terlebih jika pendapat ahli/sarjana hukum tersebut menentukan bagaimana seharusnya, sehingga pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Pendapat ahli/sarjana hukum itu menjadi sumber hukum melalui yurisprudensi. Jadi, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Putusan MK tersebut akan diikuti oleh hakim lainnya dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama.

Pekerjaan hakim pada hakikatnya sama dengan pekerjaan pembuat undang-undang, demikian dikatakan oleh Prof. Soebekti dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan* yang dikutip Oleh Siti Soetami dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Keduanya memberikan peraturan yang harus diikuti, hanya dengan perbedaan bahwa pembuat undang-undang memberikan suatu peraturan yang

disusun dalam kata-kata umum dan ditujukan kepada siapa saja yang berada dalam keadaan yang diuraikan dalam undang-undang itu, sedangkan hakim memberikan suatu peraturan yang berlaku terhadap para pihak yang berperkara.

Berdasarkan sumber Hukum Islam yaitu yang terdiri dari yang telah peneliti sebutkan sebelumnya maka sudah jelas bahwa Putusan MK bukan bagian dari sumber Hukum Islam. Adapun sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni terdapat lima sumber hukum yang tersebut sebelumnya. Maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu sebagai yurisprudensi.

Yurisprudensi timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi. Putusan pengadilan tidak langsung menimbulkan hukum, melainkan merupakan faktor saja dalam pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Jadi yang dianut oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah itu kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum yurisprudensi.⁹⁸

Yurisprudensi dapat dikolerasikan dengan sumber hukum Islam, yakni *Istishab* yaitu apa yang telah ada pada masa yang telah lalu, maka

⁹⁸Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. xxix.

menurut hukum asal dipandang masih ada di masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Seperti dalam kaidah:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يُثْبِتَ مَا يُعَيَّرُهُ

“Pada asalnya segala sesuatu itu tetap (hukumnya) berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga ada dalil yang merubahnya”⁹⁹.

Seorang hakim diperkenankan mengikuti putusan hakim sebelumnya untuk dijadikan putusan dalam kasus yang sama. Yurisprudensi dan *Istishab* memiliki persamaan walau tidak bisa disamakan persis. Yurisprudensi sebagai putusan hakim sebelumnya diikuti oleh hakim sesudahnya pada kasus yang sama dalam hukum positif dan *Istishab* sebagai Sumber hukum Islam yang apabila hukum tersebut telah ada sebelumnya, maka hukum tersebut masih ada di masa sekarang dan pada masa yang akan datang kecuali ada dalil yang merubahnya. Selain itu, Yurisprudensi mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan *Istishab*, perbedaan antara Yurisprudensi dan *Istishab* yakni *pertama*, dilihat dari ruang lingkupnya, pada Yurisprudensi ruang lingkupnya adalah Pengadilan. Sedangkan *Istishab* ruang lingkupnya adalah seluruh umat Islam. *Kedua*, Yurisprudensi diaplikasikan oleh Hakim sebagai sumber hukum di Indonesia, sedangkan *Istishab* adalah termasuk sumber hukum Islam, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang nilai kehujjahan *istishab*. *Ketiga*, pembahasan Yurisprudensi adalah perundang-undangan sebagaimana pada pasal II Peraturan

⁹⁹Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993, h. 239.

Peralihan UUD 1945, yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan perundang-undangan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut undang-undang ini”.¹⁰⁰ Sedangkan pembahasan *Istishab* adalah hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kaidah yang artinya “Pada asalnya segala sesuatu itu tetap (hukumnya) berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga ada dalil yang merubahnya”.

Hanya saja apabila dilihat dari segi sosiologis, yurisprudensi tidak sama dengan *Istishab*. Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia, yang diaplikasikan para hakim di Indonesia. Sedangkan *Istishab* sebuah penjabaran dari sumber hukum Islam, yakni Al-qur'an dan hadis, memiliki otoritas hukum yang mutlak diikuti umat Islam.

Seorang Hakim dalam merumuskan putusan adalah sedang berijtihad sebagaimana syarat-syarat seseorang berijtihad yaitu selain persyaratan umum seperti baligh, berakal, memiliki kemampuan nalar yang tinggi dan lainnya, juga memiliki persyaratan utama yaitu mampu memahami bahasa arab, menguasai ilmu ushul fikih karena berijtihad berarti melakukan pembahasan seputar masalah, memahami hukum dari dalil-dalil syara', memahami Al-qur'an secara mendalam, minimal yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, memahami Sunnah, minimal hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syara', dan memahami tujuan-tujuan pensyariaan hukum. Selain persyaratan umum dan utama, yang

¹⁰⁰Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara...*, h. xxxi.

terakhir adalah persyaratan pendukung yaitu mengetahui ada atau tidaknya *dalil al-qath'i* yang mengatur hukum masalah yang sedang dibahas dan mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama.¹⁰¹

Hakim yang tidak menemukan hukum secara pasti dalam Al-qur'an dan Hadis, mereka diperbolehkan untuk berijtihad. Yurisprudensi adalah bentuk ijtihad yaitu putusan hakim atau keputusan pengadilan yang menggunakan daya nalarnya dalam menetapkan hukum. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Sumber Hukum di Indonesia karena termasuk Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan dijadikan dasar oleh hakim lain. Yurisprudensi bisa disamakan dengan salah satu sumber hukum Islam yakni Istishab yaitu bahwa hukum/putusan tersebut masih berlaku selama tidak ada dalil/undang-undang yang merubahnya, meski ada perbedaan-perbedaan antara yurisprudensi dan istishab sebagaimana yang telah peneliti jelaskan. Yurisprudensi juga bentuk dari ijtihad karena para hakim menggunakan daya nalarnya jika tidak menemukan hukum secara pasti dalam Al-qur'an dan Hadis untuk menghasilkan putusan yang adil dan bijaksana.

¹⁰¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 352

4. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam sistem hukum di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁰² Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat dan karena sifatnya publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara.¹⁰³

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yuridis memiliki kekuatan hukum yang kuat. Tetapi jika dianalisis lebih jauh keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7

- (1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁰²Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, h.166.

¹⁰³Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 95.

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁰⁴

Berdasarkan peraturan pembentukan perundang-undangan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di luar jenis hierarki pada Pasal 7 Ayat (1) jika dilihat, Mahkamah Konstitusi menggunakan konsep *rechtsvinding* yaitu metode penemuan Hukum merupakan kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkret. Dengan demikian kedudukan putusan tersebut menjadi kabur penerapannya karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedudukan putusan tersebut dikategorikan sebagai yurisprudensi yang menjadi sumber hukum di Indonesia.

¹⁰⁴Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 dan 8.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang sama dengan undang-undang yaitu berlaku untuk umum. Berbeda dengan putusan di luar Mahkamah Konstitusi yang hanya berlaku khusus kepada pihak yang terlibat. Sedangkan sistem pembentukan undang-undang di Indonesia bahwa norma baru dapat diterapkan setelah memperoleh legitimasi dari pembentuk. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bermuatan suatu norma baru dapat dilaksanakan jika sudah memperoleh legitimasi dari pembentuk undang-undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa:

Pasal 40

Salinan putusan Mahkamah mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945 dikirimkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden/Pemerintah dan Mahkamah Agung.¹⁰⁵

Berdasarkan Pasal diatas Salinan putusan tersebut disampaikan kepada pemerintah. Namun, putusan MK belum tentu ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagaimana pasal di atas, karena MK tidak dilengkapi oleh aparat supaya membantu agar putusannya terlaksana. Walau sudah disebut dengan tegas bahwa putusan MK final dan mengikat, fakta empiris memperlihatkan bahwa tidak seluruh putusan final dan mengikat itu dapat mempengaruhi parlemen dan lembaga-lembaga lain.

¹⁰⁵Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 40.

Menurut Syahrizal, persoalan ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang menjamin aplikasi putusan final. *Kedua*, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan final.¹⁰⁶

Menurut peneliti, dalam tataran yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak berlaku selama belum ada aturan lebih lanjut yang menjadi payung hukum sebagai legal formal bagi intansi yang diberi kewenangan asal usul anak supaya anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi lain sebagaimana yang tertulis didalam putusan MK. Proses beracara di Pengadilan Agama tentang hal tersebut adalah melalui permohonan asal usul anak yang diatur dengan jelas melalui UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 55 Tentang Perkawinan dan KHI pasal 103.

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan MK dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas

¹⁰⁶Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, h.233.

mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab.

Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰⁷

Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Keberadaan masing-masing hakim konstitusi merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksanaan dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di MK, Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat mempengaruhi pendapat para hakim lainnya, begitupun sebaliknya.¹⁰⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai wadah terakhir untuk mengadili perkara sebagaimana kewenangannya yaitu menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memutus pendapat DPR dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk

¹⁰⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h.164.

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 166.

melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, sebagai penjaga konstitusi dan sebagai penafsir konstitusi. MK berperan dalam mewujudkan negara hukum untuk kesejahteraan Indonesia.¹⁰⁹

Secara sosiologis tugas utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana kewenangannya yang telah peneliti uraikan di atas adalah dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan peran Mahkamah Konstitusi yang juga telah peneliti uraikan diatas yang tak lain untuk menegakkan keadilan selain terhadap masyarakat yang bersangkutan juga kepada sistem ketatanegaraan di Indonesia karena bagaikan dua sisi mata uang, disatu sisi kewenangan MK memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya keadilan untuk masyarakat Indonesia melalui langkah-langkah progresifnya, akan tetapi disisi lain sangat penting bagi perkembangan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan pendekatan konseptual putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi dalam hukum di Indonesia untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi beberapa masyarakat yang putusannya bersifat umum. Menurut peneliti, dalam tataran sosiologis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah berlaku berdasarkan kepada penerimaan masyarakat melalui pengakuan maupun paksaan. Walaupun keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai

¹⁰⁹Fatkurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah...*, h. 79.

budaya yang berlaku di masyarakat. Tetapi terkadang masyarakat dengan terpaksa harus patuh dan tunduk kepada putusan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan lembaga peradilan lainnya. Putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia maupun ketatanegaraan di Indonesia. Sedangkan peradilan lainnya apabila merasa keberatan dengan putusan boleh mengajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan putusannya hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Mahkamah Konstitusi terdapat tiga pranata (institusi), yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Pasal 7 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan.” Artinya institusi utama dari MK adalah Sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.¹¹⁰

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar Pancasila dan UUD NKRI

¹¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Negara...*, h.165.

Tahun 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah hukum dasar dan hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. Dalam mencapai peran tersebut, MK harus menjadi institusi yang independen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi bagi lembaga negara lainnya dan menegakkan prinsip negara demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.¹¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 secara filosofis merupakan putusan dari permasalahan hukum yang bertentangan dengan hak konstitusional. Jadi apabila undang-undang bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat seperti yang di atur dalam UUD 1945 dan ada yang merasa terdiskriminasi karena adanya undang-undang tersebut maka MK sebagai alteranatif untuk mengajukan permasalahan-permasalahan tersebut. Putusannya juga bersifat dinamis sebagaimana berubahnya problematika masyarakat, menjadi keharusan untuk menyelaraskan ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa:

¹¹¹Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, 2017, h. 92.

تَغَيَّرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

”Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman,
tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”¹¹²

5. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam sistem Hukum di Indonesia

Pencatatan Perkawinan didalam syari’at Islam baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis tidak mengatur secara konkret tentang hal tersebut. Namun dalam hal muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatanya. Seiring perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan, sehingga pencatatan perkawinan diwajibkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, tetapi baru-baru ini ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang justru menyamakan peraturan tersebut. Untuk menemukan kedudukan putusan tersebut terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia maka harus dilihat dari beberapa landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Landasan Yuridis

Rumusan perkawinan yang sah dan pencatatan perkawinan disebutkan dalam satu pasal pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

¹¹²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 14.

Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹¹³ Pasal ini ditegaskan dalam penjelasan UU Perkawinan, yang menyatakan “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”¹¹⁴ Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sahnya perkawinan mereka oleh Undang-Undang Perkawinan 1974 telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹⁵

Hubungannya dengan hukum Islam adalah rumusan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 ini merupakan jaminan atau dasar berlakunya hukum Islam bagi umat Islam yang melangsungkan perkawinannya. Bahkan kalau dilihat penjelasan pasalnya, hukum (perkawinan) Islam bukan hanya sekedar dijamin berlaku, tetapi juga diharuskan berlaku bagi pemeluk agama Islam. Karena itu, apabila pemeluk agama Islam melakukan perkawinan

¹¹³ *Kompilasi Hukum Islam Indonesia...*, h. 10.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 112.

¹¹⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, h.168.

tidak menurut hukum agamanya, perkawinan demikian dianggap tidak sah. Hukum (perkawinan) Islam yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 menurut Haizirin yang dikutip oleh Taufiqurrohman Syahuri, adalah hukum Islam bukan menurut teori resepsi yang menggantungkan berlakunya hukum Islam pada hukum adat, melainkan hukum Islam menurut Pasal 29 UUD 1945 yang memuat kewajiban negara untuk menjalankan hukum setiap agama yang berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan syarat-syarat dan rukunnya tetap mempunyai kedudukan yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.¹¹⁶

Perkawinan bagi umat Islam yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan fikih, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁷ Pencatatan perkawinan bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Sedangkan bagi orang-orang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di KUA sesuai dengan UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹¹⁸

¹¹⁶*Ibid.*, h. 171.

¹¹⁷*Kompilasi Hukum Islam Indonesia...*, h. 190

¹¹⁸Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan...*, h. 168-169.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan sahnyanya perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUP itu dari segi hukum Islam sudah memadai, karena akad nikah sebagai penentu sahnyanya perkawinan dijamin kelangsungannya. Namun sahnyanya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) itu masih dituntut oleh ayat (2) yakni harus dicatatkan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara sebagai bukti bahwa pernikahan benar-benar telah terjadi, bukan sebagai faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan dan hanya sekedar kewajiban administrasi, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 5 ayat (1) KHI “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”¹¹⁹ Namun, implikasi dari pencatatan nikah dalam praktiknya bermanfaat sangat positif, terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan, peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (khususnya istri dan anak) yang dirugikan.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan, menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua prespektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud

¹¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam Indonesia...*, h. 8.

diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.¹²⁰ Dengan demikian, melalui pencatatan perkawinan maka suatu perkawinan akan memiliki kepastian dan kekuatan hukum serta hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik.

Pencatatan perkawinan tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun juga diatur oleh beberapa negara lain. Di Pakistan misalnya, pemerintah telah membuat sebuah aturan yang menyatakan, jika aturan pencatatan perkawinan tidak ditaati maka pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak perkawinan itu

¹²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 33-34.

secara pasti dikenakan hukuman penjara atau denda. Namun, aturan di Pakistan menegaskan bahwa perkawinan tidak tercatat dianggap sah secara agama. Malaysia senada dengan Pakistan tentang aturan pencatatan dan menegaskan bahwa pencatatan hanya merupakan syarat administrasi dan perkawinan tidak tercatat dianggap sah. Di Singapura, sanksi pidana diterapkan pada mereka yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Maroko juga menuntut pencatatan perkawinan sebagai persyaratan administratif, sebagaimana Pakistan dan Singapura. Namun, Maroko tidak menetapkan sanksi yang tegas terhadap mereka yang tidak mentaati aturan itu.¹²¹

Menurut Peneliti, walaupun pencatatan perkawinan diberbagai negara yang telah dipaparkan diatas bukan untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi yang melanggar aturan pencatatan perkawinan akan dikenakan hukuman penjara atau denda. Pentingnya suatu pencatatan perkawinan merupakan sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam pernikahan, dalam hal ini, Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq yang dikutip oleh Satria Effendi M. Zein membagi ketentuan yang mengatur perkawinan kepada dua katagori:

- 1) Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang

¹²¹ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013, h.28.

ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab.

- 2) Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.¹²²

Senada dengan pendapat Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq di atas, Wahbah az-Zuhaili yang dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqy*. Syarat *syar'i* maksudnya suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat *tawsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.¹²³

Berdasarkan ungkapan Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq dan Wahbah az-Zuhaili di atas, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu negara. Dari ungkapan mereka tetap mengingatkan pentingnya pencatatan perkawinan dan mengingatkan agar perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal sebagai

¹²²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 34.

¹²³*Ibid.*, h. 35.

legalitas atas suatu peristiwa perkawinan untuk menjamin suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajiban seperti nafkah, harta gono-gini dan waris. Dengan demikian, keberlakuan pencatatan perkawinan secara yuridis adalah untuk ketertiban administrasi dan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan.

b. Landasan Sosiologis

Indonesia memiliki berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, suku, ras, warna kulit, adat istiadat dan agama. Adat istiadat dan agama sangat mempengaruhi dalam tata pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan yang sah di Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perkawinan yang sah menurut aturan agama adalah perkawinan yang telah memenuhi tata tertib hukum agama. Jadi misalnya menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi unsur-unsur nikah, seperti akad nikah, mempelai pengantin (laki-laki dan perempuan), wali, saksi dan tidak sah perkawinannya jika berbeda agama.

Menurut agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. agama Kristen Katolik juga berpendirian bahwa perkawinan

antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah. Demikian pula Kristen Protestan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan tidak seiman¹²⁴ dan mencatatkan perkawinannya ke KUA bagi yang beragama Islam, ke Kantor catatan sipil bagi yang selain Islam.

Eksistensi pencatatan perkawinan di Indonesia secara sosiologis diakui keberadaannya yang dapat dilihat dari dua perspektif, yakni pengakuan dari masyarakat dan kebijakan dari pemerintah. *Pertama*, pencatatan perkawinan diakui oleh masyarakat karena secara sosiologis memiliki banyak kegunaan (manfaat) khususnya bagi istri dan anak. Bagi istri manfaat pencatatan perkawinan adalah hak nafkah, hak waris dan hak harta gono-gini lebih terlindungi. Bagi anak manfaat pencatatan perkawinan adalah status anak jadi lebih jelas, yang berkaitan dengan harta seperti hak nafkah, hak waris dan juga hak perwalian tetap terjamin. Selain itu, dengan pencatatan perkawinan maka akan diterbitkan sebuah buku nikah sebagai bukti autentik bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan secara resmi di hadapan pegawai pencatat nikah. Dengan memiliki buku nikah, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran atau bahkan yang berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum

¹²⁴M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di ...*, h. 54.

akan lebih mudah dilayani, ketimbang yang tidak memiliki buku nikah. Semua itu karena adanya bukti pernikahan berupa buku nikah. Begitu pentingnya buku nikah yang didapat melalui pencatatan perkawinan ini diibaratkan seperti Surat Izin Mengemudi bagi pengendara kendaraan bermotor. Bagi pengendara yang memiliki SIM akan merasa aman berkendara di jalan tanpa ada perasaan khawatir dikenai tilang. Demikian halnya bagi pasangan suami-istri yang memiliki buku nikah akan merasa aman dan tenteram dalam kehidupan rumah tangganya tanpa ada perasaan khawatir akan dirazia apabila menginap di hotel atau digrebeg oleh massa karena dicurigai berzina dan sebagainya. *Kedua*, pencatatan perkawinan secara sosiologis juga merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah agar perkawinan menjadi lebih tertib. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara (pemerintah) kepada pihak-pihak dalam perkawinan dan untuk menghindari penerapan hukum agama secara sepotong-sepotong untuk melegitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sejalan dengan misi utama atau tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Adanya penelantaran kepada istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, istri simpanan, poligami tanpa sepengetahuan istri sebelumnya dan lain sebagainya adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Demikian juga peraturan pencatatan perkawinan juga memiliki tujuan yang sesuai syari'at seperti menjaga diri, menjaga agama dan tujuan-tujuan syar'i lainnya. Sebagai contoh jika tidak memiliki buku nikah yang diperoleh dari mencatatkan perkawinannya, maka tidak bisa membuat salah satu dokumen negara yaitu passport yang kegunaannya salah satunya adalah untuk berhaji ke luar negeri. Maka jika tidak mempunyai hal tersebut, tidak bisa melakukan ibadah haji yang didalam agama Islam adalah termasuk rukun Islam. Hal ini sejalan dengan teori hukum, maka hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan lain-lain tujuan hukum.¹²⁵

Menurut peneliti, keberlakuan hukum pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia secara sosiologis dalam perspektif pengakuan masyarakat adalah mempunyai banyak manfaat. Adapun dalam perspektif kebijakan pemerintah adalah sebagai alat atau sarana pemelihara ketertiban dan pembaruan masyarakat di bidang perkawinan. Dengan demikian, secara sosiologis walaupun bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam wilayah agama (khususnya Islam) yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh jumhur ulama, tetapi pencatatan perkawinan dalam

¹²⁵Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, h.248.

sistem hukum di Indonesia secara sosiologis mengandung banyak manfaat dan menghindarkan dari segala mudhorat yang kemungkinan terjadi jika perkawinan tidak dicatatkan.

c. Landasan Filosofis

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai landasan filosofis adalah berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis ini dipertegas dalam Pasal 2 KHI yang berisi: *Pertama* ikatan perkawinan bersifat *mitsaaqon gholiidhan* (akad yang sangat kuat), *Kedua* semata-mata untuk mentaati perintah Allah, *Ketiga* melaksanakannya adalah ibadah.¹²⁶ Berdasarkan landasan filosofis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi perkawinan Islam adalah meliputi akidah, ibadah dan muamalah. Oleh sebab itu perkawinan merupakan hal yang sangat sakral. Perkawinan secara Islam juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW., sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَتُهُرْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا: وَأَيُّنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ

¹²⁶Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, h. 7.

كَذَٰوِكَذَا؟ أَمَا اللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).

Dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil, dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Tiga orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika diberitahukan, maka seakan-akan mereka menganggap amalan mereka terlalu sedikit. Mereka berkata, "Dimana posisi kita dibanding Rasulullah SAW? Yang Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang". Salah seorang mereka berkata, "Aku akan shalat malam selamanya". Kemudian yang lainnya berkata, "Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak berbuka". Dan orang yang satunya lagi berkata, "Aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya". Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda, *"Kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling takwa di antara kamu kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa berpaling dari sunnahku, dia tidak termasuk golonganku"*.¹²⁷

Perkawinan merupakan jalan yang diridhoi Allah SWT.

untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita¹²⁸ dalam rangka mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.¹²⁹

Konsekuensi logis dari ikatan perkawinan yang sah adalah halalnya hubungan antara suami-istri dan lahirnya hak dan kewajiban di antara suami-istri, yakni hak istri untuk dipenuhi dan

¹²⁷Hadis nomor 5063 lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 5. Lihat juga dalam Sumber Aslinya dari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Bukhori*, Bayrut: Daarul Fikri, 2006, jilid 3, h. 251.

¹²⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 99.

¹²⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h.64-68.

sebaliknya. Untuk menjamin hak dan kewajiban yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan.

Pencatatan perkawinan secara filosofis adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Berkaitan dengan landasan filosofis perkawinan dan pencatatan, Zainuddin Ali telah memisahkan antara keabsahan perkawinan dan pencatatan yakni: *Pertama*, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan yang *kedua*, pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.¹³⁰

Menurut peneliti dalam analisis keberlakuan hukum secara filosofis, pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bentuk kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum terhadap suami-istri. Dengan ungkapan lain, tidak terpenuhinya pencatatan perkawinan, maka implikasi secara hukum adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan akhirnya hak-hak keperdataan akibat perkawinan menjadi tidak terjamin.

Menurut hemat peneliti jika dianalisis lebih jauh berdasarkan teori sinkronisasi hukum kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam sistem hukum di Indonesia menjadi

¹³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.7-8.

kabur penerapannya, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kedudukan putusan tersebut dikategorikan sebagai yurisprudensi yang menjadi sumber hukum formil. Putusannya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sebagai berikut:

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹³¹*

Sedangkan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 UUP “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan tidak hanya

¹³¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 37.

menimbulkan hubungan perdata seorang anak kepada kedua orang tuanya tapi juga banyak memiliki manfaat bagi pihak-pihak dalam perkawinan, misalnya dengan akta nikah maka dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah berdasarkan hukum Islam dan hukum negara.

Pencatatan perkawinan pada awalnya berada pada kemaslahatan sekunder yakni sebagai kelengkapan administrasi. Akan tetapi, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman pencatatan perkawinan menjadi sangat urgen sebagai alat bukti autentik untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan keperdataan serta menghindari pernikahan yang tidak terkontrol. Sehingga pencatatan perkawinan pada konteks sekarang menjadi tuntutan yang bersifat primer. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat”¹³²

Pencatatan perkawinan adalah sarana untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan di kemudian hari. Seperti pengingkaran atas perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan (hak harta gono-gini, nafkah, waris dll) dan untuk melindungi dari fitnah atau tuduhan zina. Hal ini sesuai dengan metode *sad az-zari'ah* yaitu larangan terhadap satu kasus hukum

¹³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 176.

yang pada dasarnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram¹³³ dengan tujuan menutup jalan yang menyebabkan kemudhoratan, selain itu terdapat kaidah fikih:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”¹³⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memberikan solusi untuk permohonan asal usul anak dengan bukti tes teknologi maka anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan pun bisa mempunyai hubungan perdata selain dengan ibu dan keluarga ibunya juga dengan ayah dan keluarga ayahnya jika terbukti. Maka di sini menurut peneliti belum ada sinkronisasi hukum antara putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan UUP Tahun 1974. MK memberikan jalan untuk anak diluar perkawinan supaya juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, disisi lain UUP Pasal 2 ayat 2 memerintahkan untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi dengan adanya putusan MK tersebut seolah menguatkan pendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan jalan untuk menentukan adanya hak dan kewajiban antara anak dengan ayah biologisnya.

¹³³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011, h.104.

¹³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 29.

Jika dianalisis menggunakan teori *Istihsan* yaitu mencari yang paling baik¹³⁵ bahwa supaya akad nikah yang dilakukan wajib untuk dicatat. Wajibnya melakukan pencatatan terhadap akad nikah ini karena di dalam pencatatan tersebut mengandung kebaikan yang sangat banyak dan menghindari kemudhoratan yang terjadi. Supaya tidak sewenang-wenang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan berdalih tanpa pencatatanpun anak bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, Juga untuk kehati-hatian karena jika perkawinannya tidak dicatatkan dalam artian tidak memiliki buku nikah maka tidak menutup kemungkinan, anak yang dihasilkan tidak dengan perkawinan yang sah pun bisa mendapatkan hak yang seharusnya tidak dimilikinya. Anak luar kawin merupakan kategori anak yang fitrah dan tidak menanggung dosa orangtuanya, jadi ayahnya lah yang menerima konsekuensi yang harus disandangnya akibat perilakunya dengan ibu anak tersebut. Dalam UUP dijelaskan bahwasannya suatu perkawinan selain ditentukan berdasarkan atas agama dan kepercayaannya masing-masing juga harus dicatatkan. Dengan demikian maka justru dengan pencatatanlah hak konstitusional terlindungi dan tidak merasa tenang karena adanya

¹³⁵ Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui...*, h. 89.

putusan tersebut, hal ini juga mengembalikan fungsi pencatatan perkawinan yang diantaranya adalah kepastian hukum, perlindungan hukum, ketertiban hukum yang manfaatnya sangat besar terlebih kepada para wanita dan anak-anak.

Peraturan pencatatan perkawinan dalam UUP yang salah satu fungsinya adalah melegalkan anak yang dilahirkannya artinya anak yang di dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan yang diakui oleh agama maupun negara kepada kedua orang tuanya, tetapi peraturan tersebut menjadi tidak ada kejelasannya karena putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata kepada kedua orang tuanya jika bisa dibuktikan dengan tes teknologi atau lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini didukung oleh beberapa asas hukum yakni *Pertama, Lex posterior derogat legi priori* artinya suatu Undang-Undang kemudian menyisihkan yang terdahulu. *Kedua, Lex superior derogat legi inferiori* artinya suatu Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah, walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi bukan Undang-Undang karena Undang-Undang sudah ada lembaga yang membuatnya dan wewenang Mahkamah Konstitusi bukan membuat Undang-Undang tetapi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi setelah putusan tersebut dan putusan tersebut bersifat mengikat

kepada seluruh masyarakat maupun ketatanegaraan di Indonesia.

Ketiga, Lex specialis derogat legi generali artinya suatu Undang-Undang yang khusus mengesampingkan yang lebih umum. Sehingga disini kedudukan pencatatan perkawinan dilemahkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, walaupun Putusan tersebut tidak menghalangi pencatatan perkawinan tetapi putusan tersebut menjadikan aturan pencatatan perkawinan menjadi tidak ada kejelasannya karena tanpa perkawinannya dicatatkanpun anak bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya jika terbukti melalui tes teknologi dan lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Menurut peneliti, jikapun putusan MK tersebut seolah-olah mengenyampingkan hal yang seharusnya diprioritaskan yaitu peraturan pencatatan perkawinan, kita harus memelihara peraturan yang terdahulu yaitu wajib mencatatkan perkawinan sesuai pasal 2 ayat 2 UUP. Namun ketika ada yang tak dicatat maka keadilan perlu diberikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yaitu anak dari perkawinan yang tidak dicatat karena menurut Islam itu dibenarkan. Putusan MK patut diapresiasi karena putusan tersebut merupakan putusan hukum yang sangat progresif dan sangat melindungi dan mendukung si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya. Jadi, Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam sistem Hukum di Indonesia adalah menjadikan

ketidakjelasan peraturan pencatatan perkawinan karena yang berlaku dan perlu dalam sistem hukum di Indonesia adalah putusan tersebut dan keadilan juga perlu diberikan jika ada yang sangat membutuhkan tetapi pencatatan perkawinan tetaplah wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

B. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan

4. Dampak Positif

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan pada akad nikah yang merupakan wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami, dengan seorang wanita yang menjadi istri, dilakukan didepan dua orang saksi paling sedikit dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. *Ijab* diucapkan pihak wanita yang dalam pelaksanaannya oleh wali dan *qabul* diucapkan pihak pria.¹³⁶ Akad nikah pada dasarnya dilakukan atas suka sama suka, atau rela sama rela kedua pasangan. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah *ijab* dan *Kabul*.¹³⁷ Oleh karena itu, *ijab* dan *Kabul* merupakan unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah.

Perkawinan yang dilakukan oleh Machica dan Moerdiono merupakan perkawinan yang terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai yang

¹³⁶ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, h. 34.

¹³⁷ Sadiani, *Nikah via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008, h. 16.

telah diatur oleh hukum Islam, sehingga secara agama Islam perkawinan tersebut adalah sah. Pencatatan yang tidak dilakukan keduanya pada perkawinan tersebut tidak mengurangi keabsahan nilai perkawinan keduanya secara agama. Tetapi Dalam negara hukum, status anak ditentukan oleh hukum, status anak di Indonesia adalah sah apabila dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah menurut kepercayaan masing-masing, tetapi penentuan anak sebagai anak sah yang mempunyai kekuatan hukum dan mendapat jaminan hukum adalah hanya tergantung kepada waktu anak dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dan dicatatkan. Jika perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinannya tidak diakui oleh negara yang berakibat tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak seperti mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Maka dalam UU Administrasi Kependudukan bahwa wajib melaporkan segala peristiwa penting seperti kelahiran, kematian dan lain sebagainya untuk dilakukan pencatatan. Maka jika kelahiran seorang anak ingin dicatatkan atau dibuatkan akta haruslah dengan bukti autentik tentang telah terjadinya pernikahan antara kedua orang tuannya dan buktinya tersebut berupa pencatatan/ akta nikah. UUP Pasal 42 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam hal ini kemudian dianggap oleh MK bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca** ”*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*¹³⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka keturunan atau anak yang terlahir dalam perkawinan tanpa dicatatkan adalah sah dan harus diberikan hak-haknya.

Terpenuhinya semua hak anak biologis yang menjadi akibat hukum dari putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia. Sebab memelihara keturunan merupakan salah satu dari *al-maqashid syariah*, yang berarti panca tujuan hukum Islam. Maka dari itu karena adanya putusan MK tersebut, semua anak menjadi terpelihara dan hak-haknya di lindungi oleh negara seperti diperbolehkannya membuat akta kelahiran dan selanjutnya yang mana pencatatan-

¹³⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 37.

pencatatan sipil tersebut sangat berguna bagi anak untuk menempuh pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut M. Ali Yafie yang dikutip oleh Neng Djubaedah dalam bukunya menyebutkan bahwa memelihara keturunan adalah salah satu tujuan Hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah*) yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan hukum Islam lainnya, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara harta.¹³⁹ Memelihara keturunan berarti juga memelihara agama. Hal tersebut terlihat dari Islam yang mengatur hukum perkawinan sejak cara memilih calon istri atau suami, tata cara peminangan, akad nikah, tata cara pergaulan dalam rumah tangga, perceraian, *idat*, kewarisan dan lain sebagainya. Memelihara keturunan juga berarti memelihara jiwa. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan larangan melakukan pembunuhan terhadap manusia seperti melarang aborsi tanpa alasan yang kuat.¹⁴⁰

Prinsipnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana Hadis Nabi S.A.W.:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ رِيزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَائِنُ مَوْلُودٍ

إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

¹³⁹Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.311.

¹⁴⁰*Ibid.*

Diriwayatkan dari Abdan dari Abdullah dari Yunus dari Az-Zahri berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah RA. dia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda: tidak ada seorang anak yang lahir melainkan dalam keadaan *fitrah*. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya *Yahudi*, atau *Nasrani*, atau *Majusi*.¹⁴¹

Makna Hadis tersebut adalah berkaitan dengan Pendidikan bagi anak yang terkait erat dengan akal dan hati. Memelihara keturunan juga berarti memelihara akal, karena itulah dalam Islam diwajibkan kepada setiap orang tua untuk memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Oleh karena itu adanya putusan MK tersebut maka akan terjagalah psikologi anak, membuatnya merasa tenang, bahagia, tidak membuat fikiran, akalnya tidak terganggu dan tidak mengkhawatirkan ke depannya jika ingin melanjutkan Pendidikan untuk mencapai cita-citanya karena hak-haknya diberikan dan dilindungi oleh negara. Putusan MK sangat membela dan melindungi anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan karena ketika orang tua melakukan kesalahan, tidak otomatis anaklah yang akan mempertanggung jawabkannya. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Al-Quran Surah Al-An'am [6]: 164 sebagai berikut:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ أُخْرَىٰ. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “apakah (patut) aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala

¹⁴¹Hadis nomor 1359 lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani..., jilid 1, h. 291.

sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”¹⁴²

Selain itu MK mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam memutuskan suatu perkara MK berusaha semaksimal mungkin supaya memutuskan yang terbaik untuk kemaslahatan anak yang tak berdosa tersebut dan lahir dari pasangan yang tidak mmencatatkan perkawinannyapun bukan kehendaknya maka hak nya patut dilindungi dan menolak segala kemafsadatan yang terjadi dikemudian hari. Hal ini senada dengan kaidah fikih:

جَانِبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah”¹⁴³

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa memelihara keturunan dan lebih khususnya memberikan hak kepada anak biologis dari ayah biologisnya merupakan kemaslahatan bagi anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat. Sebab memelihara keturunan merupakan salah satu dari panca tujuan hukum Islam, sehingga adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi sarana atau alat untuk tercapainya kemaslahatan bagi anak-anak yang terlahir

¹⁴² Al-An'am [6]: 164. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 150.

¹⁴³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 6.

dari perkawinan yang keabsahannya belum diakomodir oleh negara. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga banyak memiliki dampak positif seperti yang telah peneliti jabarkan di atas terutama kepada anak-anak Indonesia yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, karena pada dasarnya tidak ada yang namanya dosa turunan artinya tidak seharusnya anak yang menanggung kesalahan orang tuanya karena tidak mencatatkan perkawinannya. Di sisi lain juga menurut Islam nikah *sirri* dalam artian nikah yang tidak dicatatkan tidak mengganggu keabsahan perkawinan secara agama, maka hukum berhak melindungi hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

5. Dampak Negatif

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat terlihat bahwa putusan itu juga ada sisi negatifnya, seperti dapat membuat hancurnya tatanan hukum karena dapat memudahkan orang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri* yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak. Selain itu, orang akan bisa melakukan hubungan di luar nikah dengan semaunya dan dapat mempengaruhi pelanggaran norma agama dan kesusilaan, serta dapat membuka selebar-lebarnya pintu untuk orang tidak melakukan pernikahan karena orang akan beranggapan bahwa dengan tidak menikahpun tetap dapat mempunyai hubungan. Karena dalam pendapat Mahkamah yang tertulis didalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki

sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.¹⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait akibat hukumnya terhadap peraturan pencatatan perkawinan, putusan tersebut tidak sejalan dengan UUP di Indonesia yang mewajibkan setiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tentang pencatatan perkawinan tersebut menjadi kabur dan tidak ada kejelasannya karena tanpa perkawinannya di catatkan pun anak bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya jika dapat di buktikan melalui tes teknologi atau apapun yang bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan darah. Hal ini tidak senada dengan kaidah fikih:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”¹⁴⁵

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa seharusnya untuk mengambil keputusan yang baru yang lebih maslahat harus juga memelihara keadaan lama yang juga maslahat, tetapi putusan MK tersebut bahwa demi kemaslahatan orang-orang yang tidak mencatatkan

¹⁴⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 35.

¹⁴⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 110.

perkawinannya, putusan tersebut mengenyampingkan peraturan yang lama dan secara tidak langsung putusan MK tersebut telah mengenyampingkan hal yang seharusnya diprioritaskan yaitu tentang pencatatan perkawinan. Hal itu berdampak negatif terhadap ketatanegaraan di Indonesia maupun kepada masyarakat khususnya terhadap perempuan. Menjadikan perkawinan di Indonesia tidak terkontrol dan tidak tertib hukum, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan anak karena peraturan pencatatan perkawinan dilemahkan oleh putusan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dampak positif untuk masyarakat dan anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dengan adanya putusan tersebut seolah memburamkan aturan pencatatan perkawinan dan menjadikan aturan pencatatan perkawinan tidak memiliki kepastian hukum. Perlindungan terhadap anak justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak tersebut, maka pencatatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Menurut Maria Farida Indrati dalam alasan berbeda bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan Pasal tersebut menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Hal tersebut adalah resiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974.¹⁴⁶ Resiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan dengan tidak sesuai dengan UUP. UUP tentang pencatatan perkawinan menjadi tidak ada kejelasannya karena adanya putusan MK tersebut, menjadikan tidak efektifnya UU terutama pada pasal 2 ayat 2 yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Negara mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan perkawinan sekaligus syarat terbitnya akta nikah, dapat ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan seperti menerbitkannya akta kelahiran dan pemenuhan hak-hak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya juga mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Di sisi lain karena adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadikan tanpa pencatatan perkawinanpun anak bisa

¹⁴⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 44.

mendapatkan hal tersebut diatas, menyebabkan peraturan pencatatan perkawinan buram dan menjadikan belum adanya upaya sinkronisasi hukum antara peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan putusan MK tersebut juga menjadikan peraturan pencatatan perkawinan dalam UUP tidak berlaku efektif karena adanya putusan MK yang memberikan jalan lain. Jalan yang diberikan oleh MK menimbulkan perubahan hukum dalam peraturan di Indonesia terutama tentang pencatatan perkawinan.

Perubahan hukum adakalanya hukum sebagaimana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*)¹⁴⁷ tapi adakalanya hukum berubah dengan perubahan masyarakat. Perubahan Hukum tersebut adalah alat untuk merubah masyarakat menjadikan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 melakukan perubahan di masyarakat yaitu membuka selebar-lebarnya pintu untuk orang melakukan perkawinan tanpa dicatat. Pada dasarnya MK adalah melindungi hak konstitusional masyarakat tapi di sisi lain putusan MK tersebut memiliki dampak negatif yaitu membuat hancurnya tatanan hukum karena dapat memudahkan orang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri* atau nikah yang tidak dicatatkan. Disaat hukum berubah dengan perubahan masyarakat yaitu semaraknya perkawinan yang tidak dicatatkan disebabkan beberapa faktor diantaranya ingin berpoligami tetapi tidak berani meminta izin atau yakin tidak akan diizinkan, hamil

¹⁴⁷Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 55.

di luar nikah dan lain sebagainya dan dalam hal ini MK mendukung akan hal tersebut, yang demikian dapat terlihat dari pendapat MK dalam putusannya No. 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menjadikan anak di luar perkawinan bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan tes teknologi atau lainnya yang dapat membuktikan bahwa dia mempunyai hubungan darah.

Peran pencatatan perkawinan menjadi terdiskriminasi oleh putusan tersebut dan tidaklah tepat apabila pencatatan perkawinan dianggap tidak penting terlebih mengabaikan pencatatan, karena Allah SWT pun telah mempraktekkan pencatatan ini¹⁴⁸ sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surah An-Naba [78]:29 sebagai berikut:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

Artinya: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab¹⁴⁹

Pandangan Al-quran tentang registrasi atau catatan dan dokumentasi baik berkaitan dengan dunia transaksi atau berkaitan dengan semua perbuatan manusia. Besarnya perhatian Allah pada pencatatan ini, merupakan suatu petunjuk kepada manusia bahwa pencatatan setiap peristiwa dalam kehidupan ini termasuk pula salah satunya pencatatan akad nikah sangat dianjurkan bahkan wajib dilakukan.

¹⁴⁸ Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui...*, h. 108.

¹⁴⁹ An-naba [78]: 29. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 582.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

adalah menentukan bahwa anak-anak yang dibuahkan dan dilahirkan diluar perkawinan adalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya beserta keluarganya dan ayahnya beserta keluarganya jika dapat dibuktikan dengan tes teknologi atau lainnya adalah mengenyampingkan peraturan tentang pencatatan perkawinan dan secara tidak langsung putusan tersebut malah justru membuka peluang bagi para pelaku yang tidak mencatatkan perkawinannya untuk menghalangi hak asasi anak istri di bidang kewarganegaraan dan administrasi negara.

Pembangunan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat yang berpengaruh terhadap anak dan hak-hak perdata anak, dengan cara meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru. Upaya yang dimaksud dengan meniadakan aturan dalam sistem lama yaitu meniadakan tentang akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat.¹⁵⁰ Jadi putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga mempunyai dampak negatif yaitu hancurnya tatanan negara terutama peraturan tentang pencatatan perkawinan, memberi peluang untuk melakukan perkawinan tanpa dicatatkan bahkan tanpa perkawinan sama sekali pun. Peraturan tentang pencatatan yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” pun menjadi kabur dan

¹⁵⁰Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan, studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2002, h. 335.

tidak ada kejelasannya karena di sisi lain putusan MK menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁵¹

6. Dampak Positif dan Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan

Dampak positif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebaliknya dampak negatif dari putusan tersebut adalah membuka pintu untuk melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan atau memudahkan untuk nikah *sirri* dan menjadikan aturan pencatatan perkawinan menjadi kabur. Jika dianalisis lebih jauh menggunakan teori studi hukum kritis seperti yang ditawarkan oleh *Critical legal studies* bahwa dengan menganalisis kritis terhadap hukum dengan melihat hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya dan menginginkan kritik ini memberikan sumbangan dan implikasi praksis dalam masyarakat,¹⁵² maka dalam hal ini putusan MK tersebut mempunyai implikasi dan berpengaruh terhadap masyarakat yaitu adanya dampak positif maupun negatif seperti yang telah peneliti jabarkan di atas. Pada dasarnya MK

¹⁵¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 35.

¹⁵²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 81.

melindungi hak konstitusional seluruh masyarakat di Indonesia dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut pun sangat memberikan keadilan bagi seluruh anak tetapi menurut peneliti justru dengan mencatatkan perkawinanlah hak konstitusional terlindungi. Mengenai hak anak luar perkawinan maka akan menjadi sanksi untuk kedua orang tuanya karena mengabaikan pencatatan perkawinan.

Mengenai Dampak positif dan negatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan peneliti melakukan wawancara ke salah satu Hakim PA Palangka Raya, kepala KUA dan penghulu fungsional KUA di Kota Palangka Raya untuk memperkuat hasil analisis sebagai berikut.

a. Informan Pertama

Wawancara sebagai data informan peneliti mewawancarai salah satu hakim di PA Kota Palangka Raya. Dalam hasil wawancara ketika ditanya apakah mengetahui atau tidak adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 beliau menyatakan mengetahui. Menanggapi isi putusan MK yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga

ayahnya. Beliau akan menjalankan putusan tersebut dan memeriksa perkara jika mendapat kasus permohonan asal usul anak dengan bukti DNA, akan tetapi untuk saat ini PA Palangka Raya belum pernah menerima dan melayani perkara tersebut.

Putusan MK tersebut berdampak positif yaitu anak dari perkawinan tanpa pencatatan ataupun tanpa perkawinan yang sah pun bisa mendapat kepastian, jaminan dan ada yang bertanggung jawab. Tetapi disisi lain juga berdampak negatif seperti selain mempermudah nikah siri atau tidak mencatatkan perkawinannya, kemungkinan ada perselingkuhan dan istri mengaku bahwa bukan anak suami karena mungkin selingkuhannya lebih kaya dari suaminya, kemungkinan lain adalah anak hasil zina dan ini fakual di masyarakat. Maka itulah dampak negatifnya akan terjadi kekacauan-kekacauan dalam ketatanegaraan bahkan secara sosial di masyarakat.

Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud hubungan perdata di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih ambigu apakah juga termasuk waris dan wali bagi anak perempuan. Jadi dalam hal ini beliau menyarankan bahwa putusan MK tersebut perlu ditindaklanjuti supaya muncul

peraturan baru agar makna-makna dalam putusan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian dan kekaburan hukum.¹⁵³

b. Informan Kedua

Wawancara selanjutnya dengan mewawancarai Kepala KUA Pahandut. Dari hasil wawancara ketika ditanyai tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 beliau menyatakan mengetahui adanya putusan tersebut. Menanggapi isi putusan MK tersebut, Beliau menyatakan bahwa kita negara hukum, jadi bagaimanapun putusan tersebut, suka tidak suka harus bisa menerima walaupun tidak sependapat, bertentangan dengan hati nurani kita dan jika digali lagi mungkin ada kesimpangsiuran dan ketidakjelasan. Tetapi beliau menekankan bahwa jika kita mempunyai kewenangan untuk itu kita bisa mempertimbangkan hukum tersebut lagi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut beliau berdampak secara positif dan negatif. Pertama, dampak positifnya memang untuk menjaga martabat dan lain sebagainya sebagai keluarga. Adapun dampak negatifnya menurut beliau kalau terjadi seperti itu terus, banyak yang menjadikan hal tersebut sebagai contoh dan pencatatan

¹⁵³Informan yang berinisial M merupakan salah seorang hakim di PA Kota Palangka Raya. Alamat Rumah di Jl. Sapan XI, umur 53 th. Pendidikan terakhir S2. Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 10 Mei 2019 di PA Kota Palangka Raya pada pukul 09:00-09:45 WIB.

perkawinan menjadi terkesampingkan. Selain itu juga, orang akan beranggapan bahwa tidak perlu menikah, nanti jika kita mohon asal usul anak dengan bukti tes DNA maka dapatlah sianak itu status dan lain sebagainya”.

Beliau mengatakan bahwa untuk sementara ini putusan Mahkamah Konsitusi tersebut belum ada pengaruhnya di wilayah tugas tempat beliau bekerja karena beritanya belum terlalu meluas, kalangan tertentu saja yang tau dan itupun hanya bagi kalangan yang mampu yang bisa menerapkan itu karena tes DNA tidak sedikit biaya. Namun menurutnya jika nanti ditemukan kasus tersebut maka tentu akan mengarahkan untuk mengurus ke Pengadilan Agama.¹⁵⁴

c. Informan Ketiga

Wawancara ketiga peneliti mewawancarai penghulu fungsional KUA Jekan Raya. Serupa dengan jawaban Kepala KUA Pahandut dan PA Palangka Raya beliau juga mengetahui bahwa MK menganggap Pasal 43 yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

¹⁵⁴Informan yang berinisial H merupakan Kepala KUA Kec. Pahandut. Alamat Rumah di Jl. Panenga Raya, umur 46 th. Pendidikan terakhir S1. Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 14 Mei 2019 di KUA Kec. Pahandut pada pukul 09:00-09:45 WIB.

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca** ”*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*¹⁵⁵ Ketika ditanya tanggapannya terhadap putusan tersebut beliau mengatakan bahwa kita posisinya bukan tentang setuju atau tidak setujunya, kita hanya menjalankan putusan tersebut.

Adapun terhadap isi putusan tersebut beliau menyampaikan bahwa dampak positifnya adalah dengan adanya putusan tersebut menjadikan posisi anak menjadi jelas dan mendapat pengakuan. Adapun tentang pencatatan perkawinan seharusnya syarat dan ketentuannya terpenuhi karena pencatatan tersebut banyak memiliki kebaikan. Tapi jika ada yang mengajukan masalah asal usul anak ini akan kita layani dan arahkan tapi untuk saat ini kita belum pernah menerima dan melayani perkara tersebut.¹⁵⁶

¹⁵⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 37.

¹⁵⁶Informan yang berinisial M merupakan Penghulu Fungsional KUA Kec. Jekan Raya Alamat Rumah di Rta.Milono Km. 06, umur 48 th. Pendidikan terakhir Sarjana Syariah. Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menurut hakim PA, kepala KUA maupun penghulu fungsional KUA secara tidak langsung dapat memberikan keadilan dan melindungi seluruh anak di Indonesia baik anak hasil dari perkawinan tanpa pencatatan ataupun tanpa perkawinan yang sah pun anak bisa mendapat kepastian juga untuk menjaga martabat dan lain sebagainya sebagai keluarga dan dengan adanya putusan tersebut menjadikan posisi anak menjadi jelas dan mendapat pengakuan. Namun disisi lain juga memiliki dampak negatif seperti mempermudah nikah siri atau tidak mencatatkan perkawinannya karena orang akan beranggapan bahwa tidak perlu mencatatkan perkawinan atau bahkan tidak perlu menikah toh nanti anak bisa mempunyai hubungan perdata kepada ayahnya maka akan terjadi kekacauan-kekacauan dalam ketatanegaraan bahkan secara sosial di masyarakat, pencatatan perkawinan pun menjadi terkesampingkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, para informan mengetahui isi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003 yang menyebutkan tanggung jawab MK meliputi:

Pasal 13

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 20 Mei 2019 di KUA Kec. Jekan Raya pada pukul 14:00-14:45 WIB.

- a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus;
 - b. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁵⁷

Bahwa berdasarkan Pasal di atas salah satu tanggung jawab MK adalah wajib mengumumkan hasil putusan yang telah diputus. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yaitu asas sosialisasi. Adapun tentang ketidaktahuan bagi masyarakat akan adanya putusan MK terkait norma-norma yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, ditafsirkan, diubah atau ditambah oleh MK. Menurut peneliti bukanlah salah Mahkamah Konstitusi. MK sendiri tidak memiliki kewajiban lagi dalam memenuhi tugasnya tersebut karena pada dasarnya tanggung jawab MK sudah berakhir ketika membacakan putusan terkait keadaan suatu norma dalam sidang yang terbuka untuk umum serta mem-*publish* putusan tersebut di halaman resmi MK. Sehingga masyarakat dianggap tahu dan menurut peneliti pihak legislatorlah yang dibebankan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut dan menindak lanjutinya.

Kaitannya dengan putusan tersebut bahwa dari semua informan menyatakan akan taat dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 13 dan 14.

tersebut juga menangani perkara sesuai bidang dan kewenangannya maka akan memeriksa perkara jika ada yang mengajukan masalah asal usul anak ini, walaupun untuk saat ini belum pernah menerima dan melayani perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa [4]: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan)...¹⁵⁸

Sejalan dengan hal tersebut informan menyatakan bahwa kita berada dinegara hukum, hukum tertinggi adalah Mahkamah Konstitusi jadi bagaimanapun putusan tersebut kita harus menerima. Tetapi beliau menekankan bahwa jika kita mempunyai kewenangan untuk itu kita bisa mempertimbangkan hukum tersebut lagi. Tapi karena kita belum mempunyai kewenangan maka kita harus menerima dan menjalankan putusan tersebut. Maka dari itu sebagai masyarakat yang baik dan lembaga yang patuh sudah seharusnya mengikuti dan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh lembaga tertinggi di Indonesia karena yang telah ditetapkan adalah hasil dari segala pertimbangan hukum.

Senada dengan hal itu bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut memiliki dampak positif. Ketika putusan MK terimplementasi maka persoalan anak di luar kawin dengan perkawinan tanpa pencatatan maupun tanpa perkawinan yang sah setidaknya dapat

¹⁵⁸ An-Nisa [4]: 59. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 87.

teratasi. Oleh sebab itu putusan MK tersebut bertujuan untuk kemaslahatan anak luar kawin untuk mendapatkan hak-haknya. Tapi disisi lain jika dilihat melalui pendekatan sejarah hukum artinya kehadiran hukum punya sejarahnya sendiri. Dilihat dari latar belakang permohonan pemohon bahwa pemohon dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UUP, oleh karenanya perkawinan poligami yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dicatat. Seandainya perkawinan pemohon dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam UU tersebut, maka pemohon tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan dan dijamin bahwa Pemohon akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya. Dalam kata lain pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UUP sebagai berikut:

Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁵⁹

Sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon, karena perkawinan yang tidak dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentuk UUP dalam membentuk UUP tentu telah beintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

¹⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 90-91.

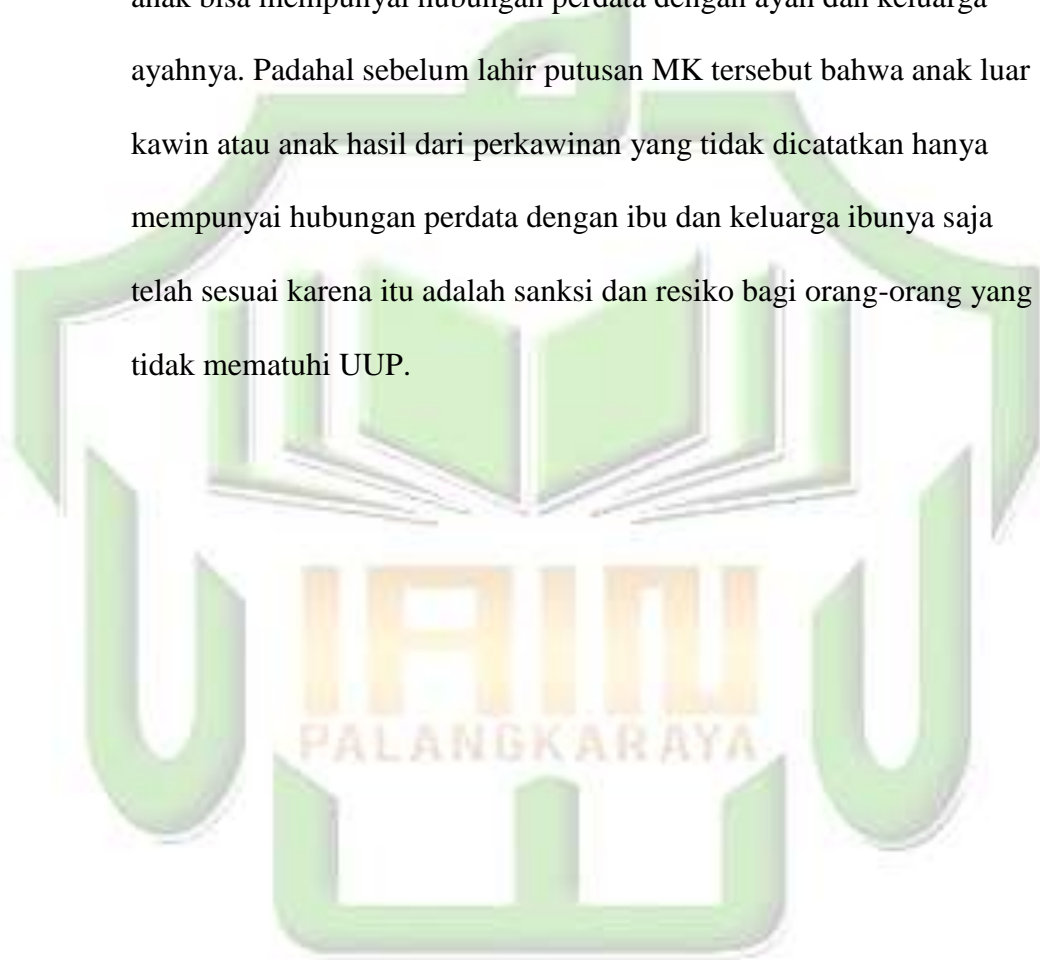
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”¹⁶⁰

Peneliti menilai bahwa tujuan MK memutus tentang hubungan perdata anak luar kawin adalah sebagai upaya untuk melindungi seluruh anak di Indonesia. Namun hal ini menjadi tidak sejalan dengan UUP ketika prosedur administrasi negara bukan menjadi faktor utama bagi kepentingan masyarakat. Padahal pentingnya pencatatan perkawinan akan mempengaruhi kelangsungan perkawinannya. Karena mencatatkan perkawinan selain merupakan tindakan administratif adalah untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu untuk kemaslahatan suami isteri dan anak dalam membentuk keluarga yang sakinah, tapi dalam hal ini justru putusan MK tersebut seolah mengesampingkan peraturan tentang pencatatan karena putusan MK tersebut berintikan hubungan keperdataan anak di luar kawin terhadap ayah biologisnya. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dan hasil wawancara terhadap informan maka Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan mempunyai dampak positif dan negatif. Ketidakterpaduan antara putusan MK tersebut yang seolah mengesampingkan pencatatan perkawinan karena anak luar kawin bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sedangkan di UUP bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut

¹⁶⁰Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 15.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini menyebabkan adanya pengaturan norma yang kabur yaitu peraturan tentang pencatatan perkawinan. Putusan MK yang mempunyai kekuatan mengikat telah melumpuhkan upaya penegakan hukum tentang pencatatan perkawinan karena perkawinan dengan tanpa dicatatkan pun anak bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Padahal sebelum lahir putusan MK tersebut bahwa anak luar kawin atau anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja telah sesuai karena itu adalah sanksi dan resiko bagi orang-orang yang tidak mematuhi UUP.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia adalah menjadikan ketidakjelasan peraturan pencatatan perkawinan karena yang diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia baik itu dalam tataran yuridis, sosiologis maupun filosofis adalah putusan MK tersebut. Secara yuridis berlaku karena ada aturan lebih lanjut yang menjadi payung hukum. Secara sosiologis berlaku berdasarkan kepada penerimaan masyarakat melalui pengakuan maupun paksaan. Secara filosofis adalah melindungi hak konstitusional masyarakat seperti yang di atur dalam UUD 1945.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan Perkawinan memiliki dampak positif dan negatif, berdampak positifnya adalah dapat memberikan rasa keadilan kepada anak agar mendapat perlindungan hukum. Bahwa putusan tersebut menjadikan status anak menjadi jelas berdasarkan pengakuan, sehingga melindungi anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat. Berdampak negatifnya yaitu terjadi kekacauan-kekacauan dalam ketatanegaraan bahkan secara sosial di masyarakat, pencatatan perkawinanpun menjadi terkesampingkan juga membuka pintu untuk melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai sebuah jalan kemaslahatan bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi disisi lain keberadaan putusan tersebut dapat menghancurkan tatanan hukum di Indonesia juga dapat memudahkan orang untuk melakukan perkawinan dengan tidak mencatatkannya, maka dari itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti yang tersebut diatas maka perlu ketegasan pihak pemerintah bekerjasama dengan PA maupun KUA dalam masalah ini seperti adanya sanksi ketika perkawinan tidak dicatatkan dan tidak serta merta mengikuti putusan MK tersebut.
2. Untuk masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, agar dapat mencatatkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang agar persyaratan administratif terpenuhi dengan prosedur yang benar juga agar status perkawinan dan anak hasil dari perkawinan tersebut memiliki status yang jelas dan kepastian di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Volume 1 Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Suan Abu Daud*, Sumber Aslinya dari Abi Daud Sulaiman bin Al- 'asy'ast Al-sjstani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, Bayrut: Daarul Fikri, 2011.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, dalam Sumber Aslinya dari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Bukhori*, Jilid 3, Bayrut: Daarul Fikri, 2006.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesisa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Basri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Bakri, Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

C.S.T., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam system ketatanegaraan republic Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

_____, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Efendi, Jonaedi dan Johnyy Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Erwin, Muhamad dan Firman Freaddy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Fatkurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

_____, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Helim, Abdul, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, Yogyakarta: K-Media, 2017.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jahar, Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad, Bahrudin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan, studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2002.

Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Hukum slam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Sadiani, *Nikah via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Simorankir, J.C.T, Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soetami, Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: IAIN, 2018.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Trinty, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya*, t.tp., 2007.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

_____, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wijayanti, Asri, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

C. Karya Ilmiah

Aldira, Dika Juan, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewarisan Anak Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Skripsi Sarjana, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Gushairi, *Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia*, Jurnal Madania: Volume 4: 1, 2014.

Harapap, Risalan Basri, *Analisis Terhadap Putusan MK tentang Anak di Luar Kawin*, Jurnal Yurisprudencia Volume 1 Nomor 1 Juni 2015.

Mahendra, Benny Dwi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri*, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Hukum UN Semarang, 2013.

Malik, Nastaina Dewi Risanty, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia*, Disertasi Megister, Depok: Fakultas Hukum UI, 2012.

Mema Mercilita M., *Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak diluar Perkawinan Menuurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Lex Privatom, Vol.II/No. 2/April/2014.

Santi, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hak Anak Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya), Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah STAIN Palangka Raya, 2014.

Udin, Amin, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kewarisan Anak Luar Kawin, Skripsi Sarjana, Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, 2017.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 40.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

UU No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 dan 8.

UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 ayat (15) dan (17).

UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 13 dan 14.

E. Internet

Fitria Isna, <https://www.kompasiana.com/pro-kontra-anak-luar-kawin-paska-putusan-mk> online 4 April 2019.

PadamuNegeri, <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>, online 20 Januari 2019.

Pranala, <https://kbbi.web.id/mahkamah>, online 15 Januari 2019.

Pranala, <https://www.google.com/amp/s/kbbi/web.id/konstitusi.html>, online 15 Januari 2019.



